



# Buletin

Volume 7 No.4/2018 Juni 2018

## Perencanaan Pembangunan Pertanian



### kata pengantar

Biro Perencanaan memiliki tugas pokok dan fungsi utama melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kebijakan, program dan anggaran pembangunan pertanian; serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tupoksi tersebut dengan baik dibutuhkan penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam penguasaan metodologi perencanaan, pengenalan isu-isu strategis pembangunan pertanian serta menyerap dinamika penyelenggaraan pembangunan pertanian di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, aparatur di unit kerja perencanaan semestinya memiliki keahlian untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta mampu berperan dalam memfasilitasi proses koordinasi penyusunan bahan penyusunan dokumen perencanaan, mensosialisasikan kebijakan anggaran, dan program serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam sebuah media komunikasi.

Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian ini merupakan upaya Biro Perencanaan untuk meningkatkan peran unit kerja perencana melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana serta mengkomunikasikan gagasan pengembangan ilmu perencanaan di bidang pertanian. Oleh karena itu, peran aktif para aparatur perencana pembangunan pertanian di Pusat dan Daerah sangat diharapkan untuk turut mengembangkan buletin ini sebagai media tukar gagasan tentang konsep dan implementasi rencana pembangunan pertanian.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap redaktur, editor dan kontributor yang telah berupaya menerbitkan buletin ini. Semoga edisi berikutnya dapat terbit secara berkala dan berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2018

### daftar isi

Strategi Program Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling Up Initiative (Readsi) Dalam Mendukung Implementasi Keuangan Inklusif Dan Pengentasan Kemiskinan	3
Dinamika Asuransi Pertanian	12
Strategi Adaptasi Perubahan Iklim Berorientasi Pada Keberlanjutan Layanan Ekosistem	19
Alsintan Menjadi Langkah Awal Menuju Pertanian Modern	31
Kajian Peran Penyuluh Pertanian Ditinjau Dari Perspektif Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian	39
Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Mensukseskan Program Upsus Pajale Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani	50



Susunan Redaktur  
Buletin Perencanaan  
Pembangunan Pertanian  
Volume 7 Tahun 2018

**Penanggung Jawab**

Dr.Ir. Kasdi Subagyo, MSc

**Redaktur**

Rr. Nina Murdiana, S.Sos, MM

**Dewan Redaksi**

Prof. (Riset). Dr. Ir. Irsal Las, M.S

Prof. (Riset). Dr. Sumarno, M.Sc

Prof. (Riset). Dr. Ir. Achmad Suryana, MS

Prof. (Riset). Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, MS

DR.Ir. Hermanto, MP

**Editor**

Drs. Tri Prianggono, MM

Dr. Ir. Prayudi Syamsuri, M.Si

Ir. Dewa Ngakan Cakrabawa, MM

Dr. Idha Widi Arsanti, SP, MP

**Design Grafis**

Yanuar Kurniawan, ST, M.Si

Sri Sapto Wardono

**Foto Grafer**

Dedi Suherman, SE

**Sekretariat**

**Bidang Keuangan**

Tati Komarawati, SE

Gusmayanti, SE

**Bidang Materi**

Ir. Kusno Hadi Utomo, MM

Marwoso, SP, MM

Hendy Fitriandoyo, SP

**Bidang Logistik**

R.Natalsari K

## Latar Belakang

Salah satu Misi Nawacita mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjadi kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategi ekonomi domestic yang mensejahterakan rakyat seperti Kedaulatan Pangan Berbasis Agribisnis Kerakyatan dan Kedaulatan Energi Berbasis Kepentingan Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nawacita.

Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi berhubungan langsung dengan perekonomian Indonesia. Ketahanan pangan akan menstabilkan dan meningkatkan perekonomian begitu juga dengan ketahanan energi menciptakan rakyat yang sejahtera dalam kehidupan. Kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan sebuah bangsa melemahkan atau menghancurkan setiap tantangan, ancaman, rintangan dan gangguan itulah yang disebut dengan ketahanan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional mutlak senantiasa untuk dibina dan dibangun serta dikembangkan secara terus menerus dengan simultan dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan bangsa. Lebih jauh dari itu adalah makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa maka makin kuat pula posisi bangsa itu dalam pergaulan dunia. Masalah besar di Indonesia yaitu dengan ketahanan pangan dan ketahanan energy bila dua masalah tersebut bias dijawab/datasi dengan jujur dan arif bijaksana maka Indonesia akan sejahtera lahir dan batin.



## STRATEGI PROGRAM RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING UP INITIATIVE (READSI) DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEUANGAN INKLUSIF DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Bayu Rahmawan  
(Perencana Muda, Badan PPSDMP)



### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian dan keuangan. Dalam konteks pembangunan kedua sektor tersebut, negara dihadapkan pada peningkatan akses dan partisipasi masyarakat akan layanan jasa keuangan. Pola pikir masyarakat desa yang masih sederhana dan kurangnya sosialisasi akan pentingnya lembaga keuangan, membuat kesadaran, partisipasi serta melek keuangan (financial literacy) masyarakat desa belum dapat dikatakan berkembang sehingga perlu adanya perubahan yang membawa masyarakat desa lebih inklusif terhadap akses keuangan. Berkaitan dengan itu, maka diperlukan pembahasan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang juga berorientasi pada inklusi keuangan khususnya untuk sektor pertanian.



Dalam kurun waktu 2008-2015, Badan PPSDMP telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan (petani) secara khusus pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan telah dinilai berhasil oleh Bappenas. Program Rural Empowerment and Agricultural Development (READ) secara signifikan berhasil memberdayakan petani kecil, meningkatkan pendapatan dan produksi serta memperkuat kelembagaan tingkat desa melalui program pemberdayaan yang terintegrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Badan PPSDMP sedang mempersiapkan kelanjutan program READ yang juga akan didanai oleh IFAD melalui Program READSI (Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative). Berdasarkan pengalaman dan lesson learned yang diperoleh dari pelaksanaan Program READ, Program READSI yang direncanakan berjalan tahun 2018-2023, akan memodifikasi model pendekatan Program READ dengan beberapa penambahan komponen termasuk scaling up lokasi serta akan mengubah paradigma 'program' yang berdiri sendiri menjadi program yang lebih luas dan inklusif dengan tujuan untuk menarik investasi swasta dan

masyarakat penerima manfaat agar juga memiliki ownership terhadap program READSI.

Dalam upaya mensinergikan program READSI dengan program Nasional khususnya dalam penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian melalui keuangan inklusif yang sejalan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (2015-2019) serta Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), melalui makalah ini diusulkan strategi/ tahapan yang perlu dilakukan oleh READSI untuk mendukung program dimaksud agar dalam pelaksanaannya dapat berdampak nyata bagi masyarakat.

### 1.2. Perumusan Masalah

- Bagaimana perkembangan implementasi inklusi keuangan secara Nasional dan di lokasi sasaran program READSI?
- Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat akses masyarakat desa terhadap sektor keuangan formal?
- Program inisiatif apa yang perlu difokuskan oleh manajemen di tingkat pusat untuk mendukung inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan di lokasi sasaran READSI?

### 1.3. Tujuan

- Mengetahui perkembangan implementasi inklusi keuangan secara Lokal dan Nasional
- Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat akses masyarakat desa terhadap sektor keuangan formal di daerah perdesaan
- Merumuskan program inisiatif yang perlu difokuskan manajemen di tingkat pusat untuk mendukung inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan sebagai kontribusi program READSI dalam pembangunan Nasional

### 1.4. Metode

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder melalui dokumentasi berupa dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui data sekunder yang diperoleh melalui website, laporan tahunan dan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan makalah ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Keuangan Inklusif (Financial Inclusion)

Financial Inclusion didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Halim Alimsyah, 2016). Dalam konteks Strategi Nasional, Keuangan Inklusif dimaknai sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Keuangan Inklusi adalah segala hal upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan (Triana Fitriastuti, 2015: 40).

Menurut Bank Indonesia, financial inclusion bertujuan untuk:

- Meningkatkan efisiensi ekonomi
- Mendukung stabilitas sistem keuangan
- Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance
- Mendukung pendalaman pasar keuangan
- Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
- Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia
- Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.
- Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Dalam konteks kebijakan yang lebih luas, Inklusi keuangan telah menjadi agenda penting pemerintah Indonesia seperti disampaikan oleh Presiden RI dalam Chairman Statement pada ASEAN Summit 2011. Selain agenda penting berupa inklusi keuangan, Presiden RI juga berkomitmen untuk melaksanakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang pada dasarnya akan berlandaskan pada layanan keuangan yang tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dengan perhatian khusus kepada

orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil (BI, 2014). Otoritas Jasa Keuangan (2013) dalam Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Indonesia telah membuat proyeksi dan kebijakan tingkat literasi dan indeks utilitas (penggunaan) jasa keuangan beberapa industri keuangan di Indonesia sampai dengan tahun 2017 dan 2023. Hal ini dilakukan untuk mencapai tingkat keuangan inklusif dan literasi keuangan yang baik di Indonesia dalam 20 tahun mendatang. Strategi Nasional Keuangan Inklusif ini dijabarkan dalam 6 buah pilar yaitu 1) Edukasi keuangan, 2) Fasilitas keuangan publik, 3) Pemetaan informasi keuangan, 4) Kebijakan/peraturan pendukung, 5) Fasilitas intermediasi dan distribusi, serta 6) Perlindungan konsumen. Dalam mewujudkan kesinambungan dari keenam pilar tersebut maka diperlukan komitmen nyata oleh pihak yang terlibat. Proses tersebut mulai dari perencanaan, pengimplementasian, pengawasan hingga evaluasi.

Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif

Sasaran Kapasitas Keuangan	Miskin berpendapatan rendah	Miskin bekerja/Miskin produktif	Hampir Miskin
Kemampuan Menabung	Tidak memiliki kemampuan menabung sama sekali/memiliki kemampuan sangat kecil tanpa akses ke layanan tabungan	Memiliki kemampuan menabung sebagian dari pendapatan, tetapi kebanyakan menabung secara informal	Memiliki kemampuan menabung dan akses ke bank formal
Akses ke kredit	Tidak dapat melunasi	Memiliki akses ke kredit informal. Mampu melunasi kredit tetapi tidak memiliki jaminan yang dapat diterima bank	Memiliki akses ke beberapa sumber formal dan informal. Mampu melunasi kredit dan memiliki barang jaminan
Kebutuhan asuransi	Sangat rentan terhadap guncangan (ekonomi) pribadi dan masyarakat	Memiliki beberapa penyangga, tetapi tetap bisa sangat berpengaruh terhadap guncangan	Memiliki beragam instrumen untuk menghadapi resiko
Kebutuhan pengiriman uang	Menerima remitans dari anggota keluarganya yang menjadi pekerja migran	Memerlukan remitansi serta kemungkinan pengiriman uang melalui ponsel	Mungkin perlu melakukan pengiriman melalui bank, membayar tagihan dll
Melek keuangan	Tidak ada	Sedang	Sedang
Identitas keuangan	Tidak ada	Terbatas	Terbatas



## Pengertian Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

### Literasi Keuangan

Didefinisikan sebagai pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Menurut OJK literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik (kecakapan/kesanggupan dalam hal keuangan).

Tingkatan literasi keuangan terbagi atas

- well literate: memiliki pengetahuan dan keyakinan atas jasa keuangan, manfaat, resiko, hak-kewajiban serta memiliki keterampilan
- sufficient literate: tidak memiliki keterampilan
- less literate: hanya memiliki pengetahuan
- not literate: tidak memiliki pengetahuan

### Inklusi keuangan

Merujuk pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan, misal: menyimpan uang yang aman, transfer, pinjaman, investasi dan asuransi.

### 2.2. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan berasal dari kata daya, kata daya dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti kekuatan dan kemampuan. Sementara pemberdayaan merupakan cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak lain memiliki daya atau kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 241-242) Pemberdayaan merupakan sebagai upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga dapat menemukan masa depannya yang lebih baik (Jim Iffe, 2005:182).

Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.

### 2.3. Kemiskinan

Pengertian Kemiskinan secara harfiah kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi



Pemberdayaan merupakan sebagai upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga dapat menemukan masa depannya yang lebih baik (Jim Iffe, 2005:182).

tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemiskinan merupakan masalah Nasional yang tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah tetapi menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah, swasta, lembaga profesi,



perguruan tinggi maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan kemiskinan tersebut jika tidak diwaspadai serta dilakukan upaya dan langkah konkrit untuk menanggulangnya akan membawa akibat yang buruk seperti menurunkan kualitas sumber daya manusia, timbulnya kecemburuan sosial, pengangguran, kerentanan, kriminalitas dan berbagai dampak negatif lainnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,58 juta orang per September 2017 lalu. Sebanyak 16,31 juta tinggal di pedesaan, sementara sisanya tinggal di kota. Penghitungan

penduduk miskin tersebut mengacu kepada batas penghasilan per kapita per bulan. Angka penghasilan sebagai batas garis kemiskinan bersifat tidak tetap. Menurut data BPS 2017, penghasilan penduduk yang menjadi batas garis kemiskinan adalah Rp 370.910 per kapita per bulan. Batas garis kemiskinan tersebut, dapat naik dan turun dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya angka inflasi dan harga kebutuhan dasar. Sebagai gambaran kondisi penduduk miskin Indonesia, pada Tabel 2 disajikan data perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan seperti

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
Mar 2011	11.05	18.97	30.02	9.23	15.72	12.49	253.016	213.395
Sept 2011	10.95	18.94	29.89	9.09	15.59	12.36	263.594	223.181
Mar 2012	10.65	18.49	29.13	8.78	15.12	11.96	267.408	229.226
Sept 2012	10.51	18.09	28.59	8.60	14.70	11.66	277.382	240.441
Mar 2013	10.33	17.74	28.07	8.39	14.32	11.37	289.042	253.273
Sept 2013	10.63	17.92	28.55	8.52	14.42	11.47	308.826	275.779
Mar 2014	10.62	17.77	28.28	8.34	14.17	11.25	318.514	286.097
Sept 2014	10.34	17.37	27.73	8.16	13.76	10.96	326.853	296.681
Mar 2015	10.65	17.94	28.59	8.29	14.21	11.22	342.541	317.881
Sept 2015	10.62	17.89	28.51	8.22	14.09	11.13	356.378	333.034
Mar 2016	10.34	17.67	28.01	7.79	14.11	10.86	364.527	343.647
Sept 2016	10.49	17.28	27.76	7.73	13.96	10.70	372.114	350.420
Mar 2017	10.67	17.10	27.77	7.72	13.93	10.64	385.621	361.496
Sept 2017	10.27	16.31	26.58	7.26	13.47	10.12	400.995	370.910

Sumber: Data BPS 2017

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Singkat Program READSI

Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) merupakan kolaborasi pendanaan antara pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) melalui skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Investasi pendanaan IFAD untuk implementasi program READSI selama 5 tahun sebesar USD 39,5 juta. Sebagian dari jumlah tersebut sebesar USD 28,1 juta atau setara dengan Rp. 365 Miliar akan diterushibahkan ke 6 Provinsi dan 18 Kabupaten melalui mekanisme on granting. Dalam hal operasional program READSI, Badan PPSDMP akan bertindak sebagai Executing Agency, dan akan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di 6 Provinsi dan 18 Kabupaten.

Tujuan utama program READSI adalah pemberdayaan rumah tangga di pedesaan di lokasi Program, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan

pendapatan dari sektor pertanian dan non-pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Sasaran program READSI adalah petani, termasuk:

- Petani miskin dan petani kelas menengah (sebagai agent) yang aktif serta berpotensi untuk meningkatkan taraf hidupnya dan membantu meningkatkan taraf hidup petani miskin lainnya; dan
- Petani tidak punya lahan dan petani pemilik lahan sempit.

Lokasi Program READ-SI berada di 14 kabupaten di Pulau Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) dan masing-masing 2 kabupaten di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. Khusus untuk di Sulawesi Tengah, READ-SI akan berada di 5 (lima) kabupaten lokasi ex Program READ, demikian juga di Kalimantan Barat dan NTT akan berada di lokasi ex program Replikasi READ.

Komponen kegiatan program READSI mencakup 2 hal sebagai berikut:

- Pengembangan pertanian dan penghidupan di pedesaan, yang terdiri dari sub program:

- Pengorganisasian masyarakat
- Pengembangan pertanian dan penghidupan
- Pengembangan lembaga keuangan di pedesaan
- Perbaikan gizi keluarga, terutama untuk anak-anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.
- Peningkatan pelayanan penyuluhan, penyediaan saprodi, dan pemasaran, terdiri dari sub program:
  - Pelayanan penyuluhan pertanian
  - Pelayanan sumber permodalan/keuangan
  - Sistem dan pemasaran perbenihan
  - Pemberian dukungan dan pemasaran untuk petani kakao
  - Pengembangan, pemasaran dan pelayanan kesehatan ternak

### Data Sosial Ekonomi di Lokasi Program READSI

Berdasarkan data Food Security and Vulnerability Atlas (World Food Program 2015) secara umum provinsi di Sulawesi yang menjadi bagian dari



program READSI memberikan indikasi yang baik tentang tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Indikator yang diukur meliputi: (i) konsumsi makanan normatif terhadap data produksi (NCPR); (ii) tingkat kemiskinan (Pov); (iii) harapan hidup (life), (iv) tingkat stunting (stunt), dan (v) female literacy (Flit).

Hasil dari pengukuran tersebut kemudian diranking dalam bentuk pengelompokan berdasarkan prioritas. Prioritas 1 adalah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, sementara kabupaten di kelompok prioritas 6 adalah makanan yang paling aman. Kabupaten dalam kelompok prioritas 1 dan 2 sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi; kelompok prioritas 3 dan 4 rentan, dan jauh lebih baik daripada kelompok 1 dan 2. Kabupaten di kelompok prioritas 3 dan 4 memiliki tingkat kerawanan pangan dan gizi yang sama, Kelompok prioritas 5 dan 6 adalah yang paling tidak rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

### 3.2. Perkembangan Inklusi Keuangan

#### Indikator keuangan inklusif

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah Negara dalam mengembangkan keuangan inklusif diantaranya adalah:

- Ketersediaan/akses, untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
- Penggunaan, untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (a.l. keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
- Kualitas, untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

d. Kesejahteraan, untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa

Berdasarkan hasil survey Nasional yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 34 provinsi dan 64 Kota/Kabupaten terkait indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan tahun 2013-2016, Indonesia secara Nasional telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Indeks literasi keuangan tahun 2013 sebesar 21.84% meningkat menjadi 29.66% pada tahun 2016. Sementara berdasarkan survey tersebut juga, indeks inklusi keuangan pada tahun 2013 sebesar 59.74% telah meningkat menjadi 67.82%. Namun demikian kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas khususnya di perdesaan.

Umumnya delivery channel yang digunakan oleh sektor jasa keuangan untuk melayani masyarakat akan

produk/jasa keuangan adalah melalui perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan lain, dana pensiun, pegadaian dan pasar modal. Data persentase indeks literasi dan inklusi keuangan per sektor jasa disajikan pada Tabel 4 berikut

untuk layanan permodalan yang sangat terbatas.

Berdasarkan data survey OJK terkait indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan hampir seluruh provinsi di lokasi READSI memiliki indeks literasi

Faktor-faktor penghambat akses masyarakat desa terhadap sektor keuangan formal

Berdasarkan pengamatan studi dokumentasi dan pengamatan di lapangan ada beberapa faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan dan sosial inklusif. Dari sisi penawaran, beberapa faktor yang seringkali membuat masyarakat tidak dapat mengakses sektor keuangan formal diantaranya jauhnya jarak cabang bank dengan tempat tinggal, prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku. Secara singkat peran lembaga keuangan formal dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat desa belum optimal. Di samping itu keterlibatan masyarakat desa akan produk keuangan (rekening tabungan, kredit atau pinjaman, dan asuransi) lembaga keuangan belum maksimal.

Tabel 4. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan per Sektor Jasa Keuangan

No	Sektor Jasa	Indeks Literasi Keuangan (persen)	Indeks Inklusi Keuangan (persen)
1	Perbankan	28.94	63.63
2	Perasuransian	15.76	12.08
3	Dana Pensiun	10.91	4.66
4	Lembaga Pembiayaan	13.05	11.85
5	Pergadaian	17.82	10.49
6	Pasar Modal	4.4	1.25

Sumber: Survey OJK 2016

Tabel 3. District composite food security and vulnerability ranking

No	District	NCPR (%)	Pov (%)	Life (year)	Stunt (%)	Flit (%)	Priority	Population
Sulawesi Tengah		0.34	14.32	67.21	41.06	5.13		
1	Banggai	0.31	9.81	69.03	-	5.99	6	334,561
2	Poso	0.33	18.22	65.52	-	4.11	3	226,389
3	Toli-Toli	0.43	13.86	64.82	-	5.60	3	217,543
4	Buol	0.78	15.06	65.95	-	2.40	3	137,479
5	ParigiMoutong	0.27	17.03	66.02	-	7.18	4	428,359
Sulawesi Selatan		0.17	10.32	70.6	40.91	12.01		
1	Luwu	0.23	15.10	74.68	-	10.99	5	338,609
2	Luwu Utara	0.17	15.52	72.03	-	9.91	5	292,765
3	LuwuTimur	0.25	8.38	71.29	-	7.47	6	250,608
Sulawesi Tenggara		0.49	13.73	68.56	42.6	10.45		
1	Konawe	0.25	16.58	68.32	-	10.54	5	250,491
2	Kolaka	0.45	16.20	67.74	-	9.98	5	329,343
3	Kolaka Utara	1.41	17.41	66.13	-	7.05	3	126,845
Gorontalo		0.19	18	67.54	38.92	2.9		
1	Gorontalo	0.23	21.57	69.57	-	3.52	5	363,146
2	Pohuwato	0.19	21.47	68.17	-	3.65	4	500,622
3	Bone Bolango	0.61	17.19	69.28	-	1.29	4	146,773

Sumber : World Food Program 2015)

Notes:

NCPR : Normative Consumption to Net Per Capita Production Ratio  
 Poverty : People Below Poverty Line (%)  
 Rank : District Rank

Life expectancy by years.  
 Stunting : Stunting Children < 5 years (%)  
 Flit : Female Illiteracy (%)

Berdasarkan data tersebut Perbankan memiliki indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan sektor jasa lainnya. Namun demikian dengan indeks literasi 28,94% menandakan hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Indeks inklusi keuangan sebesar 63,63% menandakan bahwa hanya 63% masyarakat yang mengakses perbankan atau dengan kata lain masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di wilayah pelosok dan perdesaan yang belum mendapatkan akses perbankan.

#### Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan di Lokasi Program READSI

Karakteristik program dan lokasi sasaran pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh IFAD pada umumnya adalah lokasi yang cenderung termarginalkan dan relatif jauh dari kota serta sebagiannya hampir tidak tersentuh dengan pembangunan pada umumnya. Jarak yang jauh dan terisolasi berdampak pada tingkat inklusi keuangan yang juga rendah mengingat akses masyarakat

keuangan dan indeks inklusi keuangan yang lebih rendah dari rata-rata indeks Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di lokasi perdesaan sasaran program READSI masih sangat membutuhkan layanan dan dukungan untuk akses permodalan. Data perbandingan indeks Nasional dan Provinsi di lokasi READSI tersebut disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Nasional dan Provinsi Lokasi Program READSI

No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan (persen)	Indeks Inklusi Keuangan (persen)
	NASIONAL	29.66	67.82
1	Gorontalo	23.27	62.55
2	Sulawesi Tenggara	26.55	66.91
3	Sulawesi Tengah	22.55	65.09
4	Sulawesi Selatan	28.36	68.00
5	Nusa Tenggara Timur	28.00	62.18
6	Kalimantan Barat	30.55	65.45

Sumber: Survey OJK 2016, diolah.



### 3.3. Strategi dan tahapan kegiatan untuk mendukung inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan

Pengelola program di tingkat pusat perlu membuat inisiatif strategi/tahapan yang lebih fokus untuk inklusi keuangan di lokasi sasaran. Tahapan inisiatif strategi/tahapan tersebut meliputi: a) Baseline Survey Layanan Keuangan, b) Membangun Kemitraan dengan Perbankan, c) Membangun Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 4) Mempromosikan Program Asuransi Pertanian.

#### a. Baseline survey layanan keuangan

Pengelola program di tingkat pusat perlu melaksanakan baseline survey terkait sektor layanan keuangan yang ada di daerah lokasi sasaran. Survei dasar diperlukan untuk mengetahui informasi terkait sektor jasa keuangan lokal termasuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, gerai dan jalur akses yang berbeda seperti unit dan agen mobile banking, serta LKM yang sudah terdaftar oleh OJK. Kelembagaan keuangan lainnya yang juga perlu untuk dilakukan survey adalah lembaga keuangan non bank, baik lembaga formal maupun informal, termasuk pegadaian dan koperasi simpan pinjam.

Rekrutmen personel konsultan/fasilitator keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten juga diperlukan untuk membantu memetakan dan membuat program dukungan agar layanan keuangan dapat diakses oleh



Pengelola program di tingkat pusat perlu melaksanakan baseline survey terkait sektor layanan keuangan yang ada di daerah lokasi sasaran. Survei dasar diperlukan untuk mengetahui informasi terkait sektor jasa keuangan lokal termasuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, gerai dan jalur akses yang berbeda seperti unit dan agen mobile banking, serta LKM yang sudah terdaftar oleh OJK.

masyarakat yang lebih luas. Pemetaan bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak lembaga keuangan yang ada di daerah dan berjalan dengan baik serta produknya dapat menjangkau masyarakat. Pemetaan lembaga keuangan tersebut meliputi:

Bank, mencakup informasi:

- Lokasi gerai dan agen
- Daftar produk yang dipasarkan di wilayah tersebut
- Delivery Channel yang umum digunakan untuk melayani masyarakat pedesaan, (penyajikan model intermediasi keuangan dengan skema baru)
- Identifikasi peluang kerjasama kerja sama lainnya

LKM dan Lembaga keuangan berbasis komunitas, mencakup informasi:

- Daftar LKM dan Lembaga keuangan lainnya yang ada, di desa program dan kecamatan, baik yang dibentuk oleh inisiatif pemerintah (Gapoktan, LKM-As, PNPM, dll) atau dari pihak lain (misalnya LSM)
- Status hukum dan skala ekonomi dari LKM dan lembaga keuangan

lainnya, termasuk profil anggota terutama masyarakat yang ada di desa

- Kompilasi data-data akan dilakukan dengan dukungan fasilitator desa

Lembaga keuangan non-bank lainnya

- Survei baseline diharapkan juga dapat memberikan informasi produk atau layanan yang dilakukan oleh pegadaian, perusahaan leasing atau penyedia asuransi mikro.

#### b. Kemitraan dengan perbankan

Manajemen di tingkat Pusat perlu menjalin kemitraan dengan perbankan yang lebih diutamakan dengan bank yang memiliki jaringan sampai pelosok desa seperti BRI dan BPD atau BPRS. Kemitraan ini diperlukan untuk menjembatani layanan produk/jasa keuangan antara petani dan bank. Melalui kemitraan tersebut dengan target yang 'ambisius' di setiap lokasi Provinsi/Kabupaten Program READSI akan berkolaborasi dengan perbankan untuk memperluas skema dan layanan hingga sampai ke target petani sasaran.

Salah satu program kemitraan yang dapat diinisiasi adalah program kredit bagi petani dengan melibatkan BPR, Bank Swasta dan Perusahaan Swasta. Contoh konkrit inisiasi adalah seperti pola kemitraan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pola kemitraan yang dikembangkan adalah BPR Mustika Utama Kolaka bekerjasama dengan PT Bank Andara dan PT Sulawesi Subur Sejahtera untuk melakukan kerjasama pembiayaan dan pembinaan kepada petani kakao dengan total penyaluran kredit sebesar Rp. 5 miliar. Program kemitraan semacam ini merupakan salah bentuk komitmen nyata Bank



Andara dalam mengatasi persoalan klasik para petani yaitu faktor permodalan yang terbatas dan susah mendapatkan akses pembiayaan dari Bank.

Manajemen program READSI di tingkat pusat dapat berperan sebagai 'broker' dengan mengumpulkan/memperkuat/menegosiasikan permintaan petani dan meyakinkan perbankan agar mau menyalurkan kredit dengan skema yang fleksibel.

Melalui rencana inisiasi kemitraan ini, READSI juga akan berusaha untuk lebih memahami faktor-faktor tertentu yang dihadapi oleh petugas kredit dan cabang lokal yang menjadi penghambat mereka dalam meningkatkan pinjaman kepada petani dan rumah tangga pedesaan lainnya. Faktor-faktor seperti manajemen yang lemah, kendala pemasaran atau produksi seperti kurangnya pengetahuan teknis budidaya dan informasi kualitas bagi petani pada akhirnya membuat petani tidak mampu untuk mengakses permodalan bank atau tidak mampu melunasi pinjamannya.

Melalui proses kemitraan ini diharapkan pula adanya cross learning petugas perbankan di tingkat desa bersama dengan penyuluh dan fasilitator desa yang direkrut oleh program untuk bersama-sama menghadiri berbagai kegiatan dan pertemuan para petani peserta di desa yang difasilitasi seperti:

- Menyampaikan satu atau lebih sesi pelatihan melek finansial, terutama produk bank, peran tabungan dan pinjaman, dll.
- Menghadiri setengah hari setiap sekolah lapang (SL) petani untuk mengenalkan layanan mereka kepada petani dan juga untuk lebih memahami pelatihan dan dukungan yang diberikan melalui program serta rencana investasi pertanian dan kebutuhan finansial dari petani yang akan menjadi customer potensial mereka;
- Memberikan dukungan kepada kelompok tani atau petani perorangan / investor dalam menyiapkan proposal investasi atau bisnis sebagai bagian dari aplikasi pinjaman untuk pembelian

peralatan dan mesin pertanian seperti untuk threshers, rice driers, mechanical harvester atau untuk perusahaan yang menyediakan kotak fermentasi untuk kakao.

#### c. Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam konteks kegiatan inklusi keuangan khususnya terkait pembiayaan pedesaan (rural finance) Manajemen Program di tingkat Pusat dapat menjajaki kolaborasi dengan OJK dengan fokus kegiatan utama untuk meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Masyarakat (LKM-BM) agar dapat ditingkatkan/dikukuhkan kelembagaannya menjadi LKM;

#### Pendaftaran dan Penguatan Gapoktan dan LKM-A

OJK dan Kementerian Pertanian melalui Pusat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) telah meluncurkan sebuah program untuk mendukung aplikasi, registrasi dan penguatan tabungan dan kredit bagi LKM-A, Kelompok Tani dan Gapoktan.

OJK dan Ditjen PSP berencana untuk memberdayakan dan memperkuat LKM-A direncanakan di 24 provinsi, termasuk Sulawesi Utara (4 LKM-A), Sulawesi Selatan (99 LKM-A), Sulawesi Tenggara (20 LKM-A), Gorontalo (7 LKM-A), dan Sulawesi Barat (20 LKM-A). Melalui peninjauan kolaborasi ini dan memanfaatkan kerjasama yang sudah ada, Manajemen READSI dapat menginventarisir lembaga keuangan yang ada di lokasi sasaran baik formal dan informal untuk dapat disinergikan dengan program yang lebih luas yang menjadi agenda utama OJK, khususnya dalam penguatan lembaga keuangan menjadi formal financial institution.

#### d. Promosi Asuransi Pertanian

READSI akan berkolaborasi dengan Pusat Pembiayaan Pertanian untuk mendukung perluasan cakupan dan penggunaan produk asuransi pertanian oleh petani kecil khususnya di lokasi

sasaran program. Pusat Pembiayaan bersama dengan Jasindo sejak 2015 sampai dengan saat ini meluncurkan produk asuransi pertanian untuk komoditas padi dan ternak dan tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan ke komoditas pertanian dan peternakan lainnya.

#### Referensi

Halim Alamsyah, "Pentingnya Keuangan Inklusif Dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM Terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah",

Ife, Jim, *Community Development, Australia: Penerbit Longman, 2005*

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Triana Fitriastuti, Et.Al, *Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia), (2015).*

<https://www.wfp.org/content/indonesia-food-security-and-vulnerability-atlas-2015>

[https://www.researchgate.net/publication/300166158\\_pengentasan\\_kemiskinan\\_melalui\\_lembaga\\_keuangan\\_mikro\\_syariah](https://www.researchgate.net/publication/300166158_pengentasan_kemiskinan_melalui_lembaga_keuangan_mikro_syariah) [accessed mar 08 2018].

*survey nasional literasi dan inklusi keuangan 2016, otoritas jasa keuangan*

Sukmana, Yoga

[https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/06/183640226/berapa\\_penghasilan.yang.masuk.kategori.miskin.di.indonesia](https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/06/183640226/berapa_penghasilan.yang.masuk.kategori.miskin.di.indonesia).

BPS 2017





## DINAMIKA ASURANSI PERTANIAN

Marwoso  
(Perencana Madya, Biro Perencanaan)



### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting, diantaranya sebagai penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, penyedia bahan baku bio energi, penyedia lapangan kerja, sebagai sumber investasi, sumber pendapatan nasional dan sebagai sumber devisa negara apabila komoditasnya di ekspor. Disisi lain usaha di bidang pertanian menghadapi risiko yang cukup tinggi ketika gagal panen akibat dari faktor alam seperti adanya dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, kekeringan, banjir dan lainnya. Selama ini petani sendiri yang menanggung risiko apabila terjadi gagal panen, harga pasar kurang menguntungkan, dan sebagainya.

Risiko ketidakpastian akibat gagal panen tidak menutup kemungkinan petani akan beralih ke usaha komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dan risikonya kecil. Sementara usaha tani padi merupakan usaha tani



yang memiliki risiko tinggi terhadap gagal panen. Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan berdampak pada stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya ketersediaan bahan pangan pokok beras yang merupakan pangan bagi mayoritas penduduk Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program seperti subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan saprodi, kredit program sektor pertanian misalnya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebagainya. Namun program tersebut dirasa belum mampu mengatasi berbagai masalah terutama gagal panen akibat kondisi alam. Dengan alasan ini maka Pemerintah mencoba menawarkan solusi baru yaitu Asuransi Pertanian sebagai salah satu alternatif solusi mengatasi risiko kegagalan panen.

#### 1.2. Konsep Asuransi

Asuransi menurut KUHP pasal 246 yaitu merupakan perjanjian dimana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi sebagai penggantian kepadanya suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi asuransi berarti pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutupi atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian.

Asuransi menurut UU No.2 Tahun 1992, tentang perasuransian pasal 1 ayat 1, yang dimaksud asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang

tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Sedangkan obyek asuransi menurut pasal i ayat 2 yaitu: benda dan jasa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Berdasarkan dua konsep tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga unsur terbentuknya asuransi yaitu: (1) pihak penanggung adalah perusahaan asuransi yang mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi dan memberikan kepada tertanggung ketika tertanggung mengalami kerugian; (2) pihak tertanggung yaitu pihak yang mengikat diri kepada penanggung dengan tujuan menstansfer risiko kepada penanggung serta membayar premi sebesar risiko yang ditransfer; (3) akibat/kerugian merupakan besaran nilai yang tertuang dalam polis asuransi yang harus di bayar oleh penanggung kepada tertanggung akibat peristiwa yang belum pasti.

#### 1.3. Landasan Hukum

Asuransi pertanian di Indonesia keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, berdasarkan pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”

- (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015, tentang “Fasilitasi Asuransi Pertanian”
- (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017, tentang “Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi”
- (4) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2017, tentang “Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi”

#### 1.4. Tujuan Asuransi

Asuransi pertanian dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim dan/atau risiko lainnya.

## II. ASURANSI PERTANIAN DI BEBERAPA NEGARA

#### 2.1. India

India telah mengenal asuransi pertanian sejak 1972, dengan diterapkan secara swadaya. Pada tahun 1979 Pemerintah India mencoba memberikan subsidi premi asuransi gagal panen dan mulai tahun 1985 diberlakukan skema asuransi gagal panen secara komprehensif dan mulai diperkenalkan di enam negara bagian dan dua wilayah serikat oleh perusahaan asuransi di India.



Asuransi pertanian dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim dan/atau risiko lainnya.



Pada tahun 2006/2007 skema asuransi pertanian secara nasional telah mengasuransikan sebanyak 20 juta petani di India yang meliputi petani pemilik lahan, petani bagi hasil, dan petani penyewa.

## 2.2. Cina

Asuransi pertanian di negara Cina telah diterapkan sejak tahun 1982, yaitu asuransi ternak dan asuransi gagal panen. Pada tahun 1992 perusahaan asuransi mendapat premi US \$ 98 juta, tahun 2002 turun US \$ 40 juta. Karena banyak petani yang gagal panen maka perusahaan asuransi mengalami kerugian, sehingga sejak tahun 2003 pemerintah Cina memberikan subsidi premi asuransi pertanian. Pada tahun 2005, perusahaan asuransi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga subsidi premi mengalami peningkatan. Saat ini Cina merupakan negara yang menerapkan asuransi pertanian terbesar ke dua di duni setelah United State.

## 2.3. Vietnam

Negara Vietnam mengenal asuransi pertanian sejak tahun 1982, asuransi pertanian di Vietnam dilakukan oleh perusahaan asuransi Bao Viet Insurance. Pada awalnya perusahaan asuransi tersebut tidak mendapat subsidi dari pemerintah, sifatnya suka rela tidak diharuskan namun petani di Vietnam telah sadar pentingnya asuransi karena negara Vietnam sering dilanda bencana alam seperti angin puyuh, banjir, longsor, musim kering panjang, gelombang badai, banjir roop untuk daerah selatan. Namun mulai tahun 2011 samai dengan 2013 pemerintah Vietnam memberikan subsidi asuransi antara 50% sampai dengan 100% tergantung tipe petaninya.

## 2.4. Thailand

Sejak tahun 1978 asuransi pertanian di Thailand telah diterapkan untuk produk kapas, jagung, kacang kedelai, namun pada tahun 1990 asuransi pertanian ditutup karena perusahaan asuransi mengalami kerugian yang sangat besar.



Uji coba asuransi pertanian melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu BUMN pupuk (PT Pupuk Indonesia holding compeny), Perusahaan Asuransi (Jasindo) dan Tim dari Kementerian Pertanian. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk santunan modal kerja jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT.

Hal ini disebabkan karena preminya terlalu kecil sedangkan pengantiannya cukup besar. Oleh karena itu sejak tahun 2006 ada kumpulan 9 perusahaan asuransi pertanian membuka kembali usahanya namun dengan menerapkan premi di atas 10%.

## 2.5. Jepang

Sejak tahun 1929 Jepang telah memberlakukan asuransi ternak dan pada tahun 1937 memberlakukan aturan asuransi untuk hutan nasional. Hal ini bertujuan untuk mengcover kerusakan hutan akibat kebakaran, pengaruh iklim (angin, salju, kekeringan, es, gelombang pasang) dan erupsi gunung berapi.

Skema asuransi pertanian di Jepang berdasarkan solidaritas antar petani dimana koperasi mengumpulkan dana yang berasal dari pembayaran premi. Skema asuransi pertanian bergantung pada jaringan koperasinya, tingkat lokal, regional atau nasional. Koperasi pertaian nasional di Jepang sebanyak 300 koperasi dan komoditas yang di asuransikan yaitu padi, gandum, barley, ternak, buah dan lainnya.

## III. ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA

### 3.1. Perkembangan Asuransi Pertanian

Perkembangan asuransi pertanian diawali dari berbagai kajian dan uji coba di beberapa tempat untuk mendukung terbitnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hingga pasca terbitnya Undang-undang tersebut.

#### 3.1.1. Pra UU No.19/2013

Pada tahun 2008 Kementerian Pertanian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Asuransi Pertanian. Tugas dari Pokja adalah melakukan kajian "asuransi pertanian untuk tanaman padi". Output yang diharapkan dari kajian ini adalah memberikan dukungan disyakkannya Rancangan Undang-Undang Asuransi Pertanian. Pokja melakukan Public Hearing ke beberapa kabupaten sampel yaitu Tabanan di Bali dan Simalungun di Sumatera Utara. Tujuan Pokja melakukan Public Hearing adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari sasaran asuransi pertanian yang terkait dengan kemauan petani untuk ikut asuransi dan kemampuan petani untuk membayar premi.

Selain melakukan kajian terkait asuransi pertanian, Kementerian Pertanian juga melakukan uji coba asuransi pertanian di beberapa provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Uji coba asuransi pertanian dilakukan pada tahun 2012 dan 2013 untuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Uji coba asuransi pertanian melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu BUMN pupuk (PT Pupuk Indonesia holding compeny), Perusahaan Asuransi (Jasindo) dan Tim dari Kementerian Pertanian. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk santunan modal kerja jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT.

Uji coa tahap I dilakukan pada musim tanam Oktober 2012 s.d. Maret 2013, dalam uji coba tahan I ini asuransi Jasindo mengalami kerugian 857%. Tahap I Jasindo menerbitkan 42 polis dengan total premi Rp.112,16 juta,



sedangkan klaim yang harus ditanggung Rp. 961 juta. Kerugian ini diakibatkan karena daerah uji coba merupakan daerah yang rawan bencana sehingga banyak petani yang gagal panen.

Uji coba tahan II dilaksanakan pada musim tanam Oktober 2013 s.d. Maret 2014. Uji coba tahan II dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten OKU Timur) dan Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Jombang dan Nganjuk). Uji coba tahap II Jasindo rugi sekitar 68%.

Selain uji coba AUTP Kementerian Pertanian juga melakukan uji coba AUTS pada tahun 2013 sebanyak 58 ekor sapi di tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 25 ekor, Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 23 ekor, dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 10 ekor. Uji coba AUTS dilakukan secara swadaya, premi dibayar 100%. (sumber: Ditjen PSP).

#### 3.1.2. Pasca UU No.19/2013

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan asuransi pertanian setelah terbitnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maka Kementerian Pertanian melakukan uji coba lagi tahap III yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang dan Nganjuk dengan bantuan premi dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Uji coba ini dilaksanakan

### 3.2.1. Organisasi Pelaksana

Dalam rangka penyelenggaraan asuransi baik AUTP maupun AUTS diperlukan pelaksana untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pelaksana AUTP atau AUTS di pusat melibatkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Eselon I terkait, serta Pokja Asuransi Pertanian.

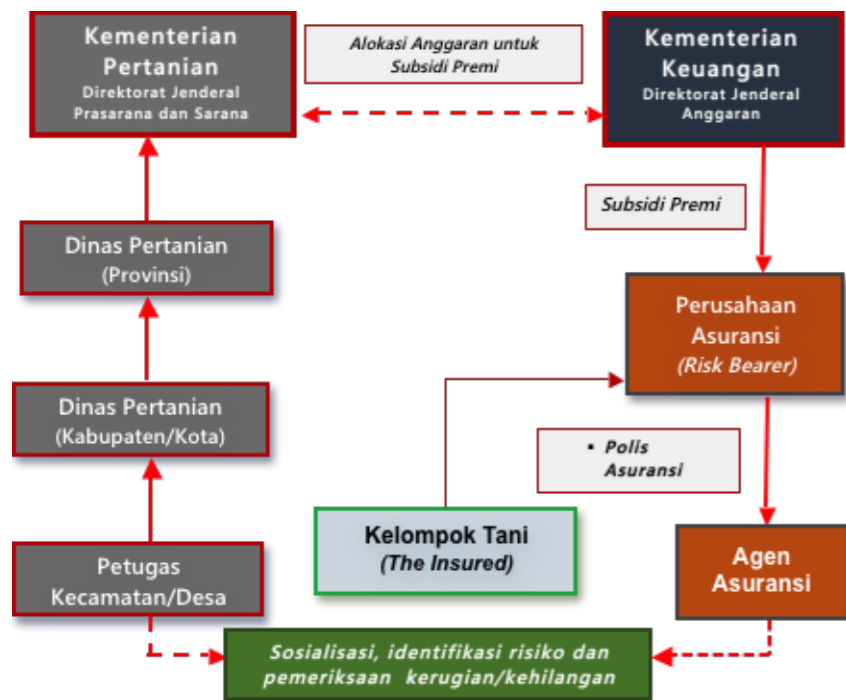
Untuk pelaksana AUTP/AUTS di Provinsi melibatkan Dinas lingkup pertanian terkait di Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota melibatkan Dinas lingkup Pertanian yang menangani asuransi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebagai mitra kerja PT Jasindo juga terlibat mulai dari level pusat sampai level lapangan.

### 3.2.2. Pelaksanaan

Berdasarkan UU No. 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, mengamanatkan Kementerian Pertanian agar dapat menyediakan perlindungan kepada petani dalam usaha taninya. kegiatan asuransi pertanian merupakan salah satu tindak lanjut amanat UU tersebut. Asuransi pertanian dapat sebagai edukasi yang lebih baik kepada petani dibandingkan dengan program penggantian kerugian petani karena gagal panen dengan uang tunai. Penggantian kerugian petani dengan uang tunai sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya khususnya dalam menentukan petani penerima bantuan langsung tunai tersebut. Dengan demikian pemberian bantuan uang tunai dengan skim asuransi pertanian untuk melindungi petani secara finansial menjadi lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaksanaan asuransi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian telah dimulai sejak tahun 2015 untuk AUTP dan mulai 2016 untuk AUTS. Syarat petani layak di beri subsidi premi asuransi, prosedur pendaftaran, penetapan kerusakan tanaman, mekanisme klaim dan sebagainya telah diatur dalam buku pedoman teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan asuransi pertanian dan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan.





Gambar. Mekanisme pelaksanaan asuransi pertanian

Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran bantuan premi untuk setiap petani yang mendaftar sebagai peserta asuransi. Jumlah premi yang ditetapkan untuk AUTP adalah sebesar Rp. 180.000/ha/MT dan 80% dari nilai premi ini dibayarkan/dibantu pemerintah (Rp. 144.000/ha/MT), dan sisanya 20% (Rp. 36.000) dibayar petani untuk pertanggung jawaban kerugian karena banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. Premi untuk AUTS sebesar Rp. 200.000/sapi/tahun dan juga sebesar 80% ditanggung pemerintah (Rp. 160.000), sisanya Rp. 40.000 dibayar peternak sebagai bagian dari edukasi dalam bentuk tanggungjawab untuk pertanggung jawaban kematian ternak karena penyakit, kecelakaan atau kecurian.

Pelaksanaan kegiatan AUTP dan AUTS telah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Data terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan partisipasi petani (2015-2017) dengan luas areal (padi) dan kenaikan jumlah ternak (sapi) yang diasuransikan. Klaim karena kerusakan tanaman/gagal panen dan kematian ternak sebagaimana yang tertera dalam tabel merupakan konsekuensi logis dari keikutsertaan petani/peternak dalam berasuransi.

Pembayaran klaim dimaksudkan untuk membantu petani menyediakan modal kerja untuk memulai kegiatan usahatani.

Pada dasarnya tujuan pencapaian pembangunan pertanian nasional, tidak diinginkan adanya peningkatan pembayaran klaim. Besarnya pembayaran klaim tidak hanya dilihat sebagai upaya membantu petani, tetapi juga perlu dicermati sebagai bagian dari pengurangan produksi padi atau pengurangan jumlah ternak yang tidak sejalan dengan program pembangunan pertanian untuk peningkatan produksi. Namun dilihat dari sisi kebutuhan petani, jaminan yang diberikan asuransi akan sangat bermanfaat membantu penyediaan modal kerja petani dalam pertanaman berikutnya atau membeli ternak sapi yang akan dipeliharanya.

### 3.2.3. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi program asuransi pertanian dimaksudkan untuk memperkenalkan secara komprehensif kepada para pihak dan sekaligus meningkatkan pemahaman kepada para petani dan peternak pada wilayah yang lebih luas. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi asuransi pertanian belum

menjadi prioritas dalam kegiatan di dinas pertanian maupun peternakan di daerah. Sosialisasi belum direncanakan dan diselenggarakan secara teratur, tetapi sifatnya hanya numpang pada kegiatan lain yang sedang dilaksanakan oleh petugas dinas di lapangan.

Informasi asuransi pertanian dalam bentuk media cetak, e-media, pameran, dan sebagainya belum banyak dilakukan, baik secara lokal maupun nasional. Sosialisasi secara internal pada kalangan masyarakat tani juga belum dilakukan secara intensif, sehingga menimbulkan keraguan kepada petani untuk ikut sebagai peserta asuransi. Petani yang belum pernah mengalami korban bencana alam atau risiko gagal panen atau kematian ternak menganggap asuransi pertanian tidak perlu.

### 3.2.4. Respon Petani

Perlindungan pertanian yang dilaksanakan dengan model asuransi harus di dasarkan kepada pengetahuan dan pemahaman adanya risiko usahatani yang mengakibatkan kerugian di pihak petani. Asuransi mempunyai prinsip saling membantu diantara peserta asuransi ini merupakan sesuatu hal yang sangat luhur. Sehingga diharapkan respon petani dan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan program asuransi pertanian menjadi positif.

Respon petani dan pemangku kepentingan seperti petugas dinas, pengurus asosiasi, petugas perusahaan asuransi, perangkat desa menyatakan bahwa asuransi pertanian (AUTP dan AUTS) dapat membantu petani secara finansial ketika menghadapi risiko kegagalan panen maupun kematian ternaknya. Terungkap keinginan petani untuk meningkatkan nilai pertanggung jawaban dalam skim AUTP dan AUTS.

## IV. PERMASALAHAN

Kegiatan asuransi pertanian baik AUTP maupun AUTS telah berjalan 3 tahun dan sekarang memasuki tahun ke-4, namun masih ditemukan berbagai permasalahan baik di tingkat lapangan



Tabel. Partisipasi petani/peternak dengan luas areal dan jumlah ternak sapi yang diasuransikan serta besaran klaim, 2015-2017

Tahun	AUTP			Klaim (Rp.000)	AUTS			Klaim (Rp.000)
	Target (ha)	Realisasi (ha)	%		Target (ekor)	Realisasi (ekor)	%	
2015	1.000.000	233.499,55	23,3	23.148.389	-	-	-	-
2016	1.000.000	499.962,25	49,9	78.393.661	120.000	20.000	16,6	9.942.587
2017	1.000.000	997.960,54	99,8	96.115.945	120.000	92.176	76,8	7.571.035

Sumber: Direktorat Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2017

maupun di tingkat manajemen. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain yaitu:

1. Kesadaran masyarakat petani untuk berperan atau berkontribusi menjadi anggota asuransi masih rendah, dikarenakan masih rendahnya tingkat kepercayaan terhadap asuransi, takut akan kesulitan dalam pencairan klaim. Disamping itu masih ada beberapa petani merasa belum perlu asuransi karena selama ini merasa tidak pernah gagal panen.
2. Masih ditemukan beberapa Pokja asuransi pertanian belum paham betul terkait sistem atau mekanisme asuransi pertanian, baik dalam pendataan dan pendaftaran menjadi anggota asuransi maupun tata cara mekanisme pencairan klaim.
3. Gagal panen yang dapat di klaim dipersyaratkan apabila kerusakan tanaman padi minimal 75%. Kebijakan ini masih dianggap belum berpihak kepada petani. Karena jika menunggu kerusakan sampai dengan 75% akan memperlambat waktu tanam ulang.
4. Hubungan antara perusahaan asuransi (PT Jasindo) dengan Dinas Pengelola asuransi pertanian masih belum harmonis, kadang kala perusahaan asuransi berjalan sendiri dalam pendaftaran petani masuk asuransi tanpa melibatkan dinas, sehingga data di dinas sering tidak sama dengan data yang ada di perusahaan asuransi.
5. Sosialisasi asuransi belum dilaksanakan dengan serius, sifatnya masih numpang pada kegiatan lain yang ada di Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dimaklumi karena dinas belum menganggarkan pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, sementara perusahaan asuransi juga masih enggan melakukan intervensi.

6. Proses pendaftaran, penerbitan polis, hingga pengumpulan premi serta mekanisme klaim berdasarkan pengalaman petani membutuhkan waktu lama, demikian juga dengan proses penetapan kepesertaan petani/peternak dalam skim asuransi sampai pengesahan di tingkat dinas setempat dinilai masih cukup memakan waktu yang lama hanya untuk memenuhi tuntutan persyaratan administrasi.
7. Keterbatasan sumberdaya manusia di pihak perusahaan asuransi juga menjadi salah satu masalah yang dapat mengurangi kinerja skim asuransi pertanian, sehingga sering mengalami keterlambatan dalam pengecekan ke lapangan apabila ada petani yang mengklaim kegagalan panennya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Amanat UU No. 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dirasa telah mampu memberikan perlindungan terhadap petani melalui program asuransi pertanian baik AUTP maupun AUTS. Selain itu kegiatan ini juga dapat memberikan edukasi yang lebih baik kepada petani dibandingkan dengan program penggantian kerugian petani karena gagal panen dengan uang tunai. Setelah dua tahun dilaksanakan,

asuransi pertanian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan partisipasi petani/peternak.

Dalam rangka pencapaian pembangunan pertanian secara nasional, tidak diinginkan adanya peningkatan pembayaran klaim, karena jika banyak klaim maka diindikasikan bahwa program peningkatan produksi pangan dianggap gagal. Namun dilihat dari kebutuhan petani, jaminan yang diberikan asuransi akan sangat bermanfaat membantu penyediaan modal kerja petani dalam pertanaman berikutnya atau membeli ternak sapi yang akan dipeliharanya.

Kemampuan SDM yang terlibat dalam pengelolaan asuransi pertanian belum memadai sehingga perlu ditingkatkan kapasitas maupun jumlahnya. Kegiatan sosialisasi dan promosi belum menunjukkan kinerja yang layak untuk meningkatkan kepesertaan sebagaimana diharapkan. Koordinasi merupakan kata kunci keberhasilan pengembangan asuransi pertanian dengan melibatkan seluruh stakeholder yang bersangkutan.

### 5.2. Saran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan asuransi di lapangan maka dapat diusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan masih kurangnya perhatian terhadap sosialisasi dan promosi asuransi pertanian maka disarankan agar Pemerintah Daerah segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengawal program



asuransi ini. Sementara asuransi sebagai instrumen penanggulangan risiko masih terkesan terpisah dengan program perlindungan pertanian, untuk itu sebaiknya agar pembiayaan pengelolaan asuransi dapat diintegrasikan dengan pembiayaan rutin daerah.

2. Sosialisasi dan promosi program asuransi pertanian agar diagendakan secara rutin untuk lebih memperkenalkan asuransi pertanian menjadi efektif dan dipahami oleh masing-masing pihak terutama petugas asuransi yang ada di lapangan dan petani/peternak sebagai sasaran program ini (memperluas cakupan wilayah asuransi).
3. Perlu diintegrasikan program asuransi pertanian dengan program pembangunan pertanian lainnya seperti program kartu tani, bantuan alat mesin pertanian dan sebagainya.
4. Mengingat beban keuangan pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan dinamika pembangunan nasional berkelanjutan, maka beban bantuan (subsidi) juga perlu disorot lebih cermat. Mengurangi beban subsidi diperkirakan akan lebih mengefektifkan penyelenggaraan program pembangunan itu sendiri.
5. Mengurangi besarnya subsidi premi dan meningkatkan nilai pertanggunggaran, disinyalir dapat mengurangi beban anggaran Pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan petani membayar premi.
6. Permasalahan keterbatasan SDM perusahaan asuransi dapat diatasi dengan menggunakan teknologi informasi secara elektronik.

7. Perlu dibangun komunikasi antar sesama pemangku kepentingan untuk mencapai tingkat kerjasama yang lebih baik dan untuk meraih tingkat koordinasi yang lebih harmonis. Para pemangku kepentingan dianjurkan mengambil inisiatif berkomunikasi untuk memperoleh suatu tingkat kemanfaatan yang diharapkan.
8. Pencurian sapi sering terjadi, untuk itu diusulkan agar lebih diperketat dengan mewajibkan peternak menyediakan kandang sapi sehingga setiap sore hari sapi kembali masuk kandang jika pada siang hari merumput di padang penggembalaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko kehilangan ternak pada malam hari. Peternak dapat lebih berkonsentrasi menjaga ternak pada siang hari.
8. Diusulkan program asuransi pertanian agar diperluas dengan mencakup komoditas lain, seperti cabai, bawang merah, jagung, tebu, ternak kerbau, kambing dan domba.
9. Pelaksanaan program asuransi pertanian melibatkan penyuluh dan pengamat hama, perlu diberikan insentif agar dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.

## REFERENSI

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. 2014. Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi

(GP3K). Kementerian Pertanian. Jakarta.

Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian. 2017. Laporan Evaluasi Program Asuransi Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.

Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. 2012. Pedoman Umum Program Asuransi Pertanian: Melindungi dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Kementerian Pertanian. Jakarta.

Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Asuransi Pertanian Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018. Makalah disampaikan dalam pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Batam, 15-16 Desember 2017. Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2009. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Pasaribu, S.M., A. Sudiyanto, M.M. Landay, Siswoyo, dan M. Ali. 2013. Pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pertanian di Indonesia. Laporan Supervisi. Kerjasama Kementerian Pertanian, Bappenas dan JICA. Jakarta.

Pasaribu S.M., I.S. Anugrah, E. Ariningsih, N.K. Agustin, dan A. Askin. 2009. Pilot Project Sistem Asuransi Untuk Usahatani Padi. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Bogor.



# STRATEGI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN LAYANAN EKOSISTEM

Sri Asih Rohmani  
(Perencana Madya, Balitbangtan)



## I. PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah terjadi dan merupakan tantangan paling serius yang dihadapi dunia di abad 21. Dampak perubahan iklim tidak saja dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia, namun juga negara-negara maju lainnya di dunia. Sejumlah bukti mengindikasikan bahwa masalah pemanasan global yang terjadi pada 50 tahun terakhir memiliki kecenderungan disebabkan oleh tindakan manusia dan dampaknya di masa depan diperkirakan akan jauh lebih besar dari yang diduga sebelumnya.



Perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan pada iklim dipengaruhi aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer dan yang akan memperbesar keragaman iklim teramati pada periode yang cukup panjang (Trenberth, Houghton dan Meira Filho 1995). Perubahan iklim mengacu pada perubahan dalam status iklim yang diidentifikasi dengan perubahan rata-rata dan atau variabilitas faktor-faktor terkait iklim dan tetap berlaku untuk periode yang luas atau lebih panjang (IPCC 2007). Undang Undang Nomor: 32 tahun 2009 PPLH Pasal 1 (19) mendefinisikan perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim alamiah terjadi secara gradual dalam rentang waktu yang cukup



Perubahan iklim karena pemanasan global disebabkan oleh faktor internal dan kekuatan eksternal yang sesungguhnya tidak terlepas dari berbagai aktivitas dan kegiatan antroposentris manusia dalam memenuhi beragam kebutuhannya. Eksplorasi sumberdaya alam secara terus menerus dapat merubah

Sejak awal revolusi industri, konsentrasi karbondioksida pada atmosfer bertambah mendekati 30%, konsentrasi methane lebih dari dua kali dan konsentrasi asam nitrat bertambah 15% (USAID 2011). Dalam periode tahun 1906-2005, peran kontribusi kegiatan manusia (faktor antropogenik) dalam meningkatkan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer telah mempercepat laju peningkatan temperatur permukaan rata-rata global hingga mencapai  $0,74^{\circ}\text{C} + 0,18\sigma$  (Fourth Assessment Report-AR4, Intergovernmental Panel for Climate Change-IPCC 2007). Kecenderungan kenaikan temperatur global (global warming) diyakini telah mengakibatkan perubahan iklim di berbagai tempat di dunia saat ini (UNDP 2007; RAN API 2014).

Berbagai fenomena bencana yang terjadi di belahan dunia (badai, kebakaran hutan, serangan udara panas yang terjadi di Amerika, Australia atau negara-negara Eropa) semestinya menjadi alasan kuat pentingnya pergerakan dan komitmen bersama dalam melakukan berbagai strategi dan upaya membangun dan meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan bagi kelangsungan

United States of Department Agriculture (USDA 2010) menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan akumulasi gas-gas pencemar atmosfer yaitu karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ), methane ( $\text{CH}_4$ ), dinitrooksida ( $\text{N}_2\text{O}$ ), dan klorofluorokarbon (CFC) sebesar 0,50-1,85% per tahun.

panjang, namun sejak revolusi industri, telah terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca cukup signifikan yang menyebabkan pemanasan global. Selain meningkatkan suhu udara, pemanasan global juga menyebabkan : (a) peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim atau anomali iklim seperti El-Nino dan La-Nina, serta penurunan atau peningkatan suhu secara ekstrim; (b) perubahan dan ketidakmenentuan (uncertainty) curah hujan dan musim; (c) peningkatan permukaan air laut dan robb (gelombang pasang laut).

keseimbangan komposisi atmosfer dan keseimbangan alam. United States of Department Agriculture (USDA 2010) menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan akumulasi gas-gas pencemar atmosfer yaitu karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ), methane ( $\text{CH}_4$ ), dinitrooksida ( $\text{N}_2\text{O}$ ), dan klorofluorokarbon (CFC) sebesar 0,50-1,85% per tahun. Fenomena ini sering disebut efek rumah kaca "green house effect" yang ditandai dengan meningkatnya suhu bumi dan dikenal sebagai pemanasan global (global warming).



kesejahteraan hidup manusia dan keberlanjutan pembangunan di berbagai bidang secara lestari.

Dampak yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan masyarakat tidak terkecuali sektor pertanian. Anomali iklim (variasi iklim) sebagai bentuk telah terjadinya perubahan iklim telah mengganggu kegiatan pertanian antara lain gagal panen dan penurunan produksi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang berimplikasi pada kehidupan petani. Di satu sisi, mewujudkan sistem pangan dan pertanian secara berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan sekaligus tantangan pembangunan pertanian saat ini dan ke depan. Upaya pencapaiannya dirasakan semakin berat disebabkan adanya kecenderungan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, perubahan pola makan karena perbaikan pendapatan, serta sistem pangan semakin terancam oleh tekanan degradasi lahan, perubahan iklim dan semakin terbatasnya sumber daya lahan dan air.

Organisasi pangan dan pertanian dunia mengingatkan bahwa untuk memenuhi

peningkatan permintaan pangan penduduk dunia, sektor pertanian pada tahun 2050 harus mampu memproduksi pangan, pakan dan biofuel lebih dari 50% dari kondisi tahun 2012 (FAO 2017). Dengan proyeksi populasi dunia akan mencapai 9,73 miliar pada tahun 2050, permintaan produk pertanian global diproyeksikan akan meningkat lebih dari 63% pada periode 2005 sampai 2050. Di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, untuk memenuhi permintaan yang meningkat, pangan yang diproduksi harus lebih dari dua kali lipat pada tahun 2050, sementara

kebutuhan pangan tersebut, pertanian harus mampu bertransformasi diri guna : (i) memenuhi meningkatnya permintaan bahan pangan, (ii) berkontribusi lebih efektif mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi, (iii) tangguh dan tanggap dalam mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus memiliki kemampuan mengurangi atau memanfaatkan variabilitas dan dampak perubahan iklim; serta (iv) menjadikan pembangunan lebih berkelanjutan secara ekologis. Arah pertanian berkelanjutan sejatinya

Kecenderungan kenaikan temperatur global (global warming) diyakini telah mengakibatkan perubahan iklim di berbagai tempat di dunia saat ini (UNDP 2007; RAN API 2014).

di seluruh dunia diproyeksikan akan meningkat lebih dari sepertiga dibandingkan pada saat ini.

Untuk menjawab dua tantangan besar terkait dampak perubahan iklim global dan tuntutan peningkatan pemenuhan

untuk menjamin kesejahteraan keluarga petani dan pelaku usaha tani sekaligus menjamin ketersediaan dan akses pangan kepada masyarakat luas (Sustainable Development Goals-SDGs 2017).





Berbagai langkah dan strategi harus dapat dirumuskan bersama sebagai bentuk tindakan nyata serta perlunya mekanisme dan tata kelola yang lebih baik untuk pemikiran dan tindakan jangka panjang, termasuk memperkuat penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, dan perubahan kelembagaan. Diperlukan sebuah pendekatan yang dapat membuka potensi keunggulan partisipatoris nyata masyarakat, sektor publik dan swasta dalam mengatasi kompleksnya permasalahan pembangunan pangan dan pertanian, termasuk karena dampak perubahan iklim. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan tetap memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian berkelanjutan, di antaranya adalah eksploitasi lahan, air, hutan dan ketidak-arifan dalam pemanfaatan layanan ekosistem.

Berprinsip dan belajar pada keseimbangan layanan ekosistem bumi yang telah dianugerahkan bagi kehidupan manusia, menjadi pijakan analisis kritis dalam merancang arah kebijakan mendukung implementasi pembangunan pertanian yang adaptif dan partisipatif dalam menghadapi perubahan iklim. Komitmen dan sinergi bersama sebagai tindakan kolektif “collective action” dalam membangun ketahanan iklim perlu terus diupayakan. Strategi yang komprehensif, diikuti dengan kegiatan aksi yang konkret perlu dibangun dalam berbagai tingkatan mulai dari tingkat rumah tangga, komunitas, daerah hingga level nasional dengan menyelaraskan berbagai potensi inisiatif lokal yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, keseluruhan penulisan ini bertujuan untuk : (1) mendiskusikan dampak perubahan iklim dalam sistem produksi pangan dan terobosan teknologi untuk

meningkatkan adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim; dan (2) layanan ekosistem serta implikasinya bagi strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Keseluruhan analisis dan gagasan diharapkan dalam satu garis “in line” dengan arah kebijakan dan pengarusutamaan (mainstreaming) adaptasi terhadap perubahan iklim sesuai dengan tantangan dan permasalahan pembangunan pangan dan pertanian nasional ke depan.

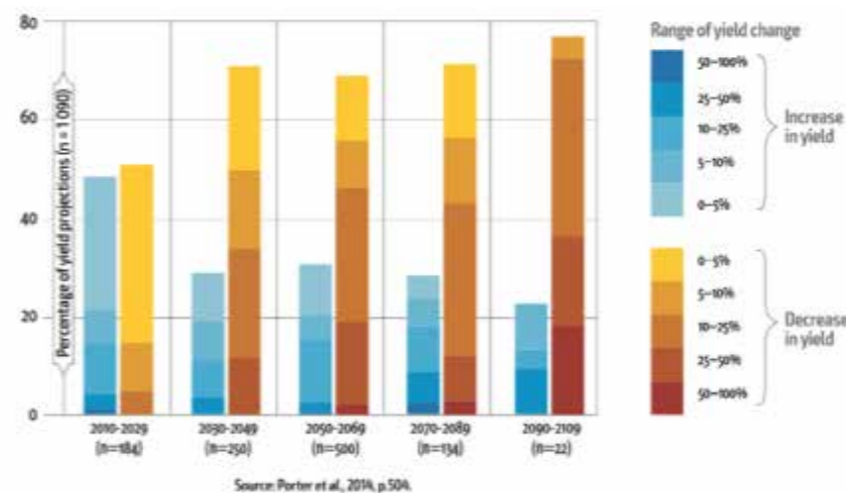
## II. PERUBAHAN IKLIM MENJADI TANTANGAN BAGI PRODUKSI PANGAN NASIONAL DAN GLOBAL

### 2.1 Dampak Perubahan Iklim Dalam Sistem Produksi Pangan

Dampak perubahan iklim terhadap keamanan pangan global tidak hanya terjadi pada pasokan pangan, tetapi juga kualitas, akses dan pemanfaatan pangan, serta stabilitas ketahanan pangan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi sifat nutrisi dari beberapa tanaman. Peningkatan kadar CO2 menyebabkan konsentrasi mineral beberapa tanaman (gandum, beras dan kedelai) dapat mencapai 8% lebih rendah dari angka

normal. Konsentrasi protein juga lebih rendah, sedangkan karbohidrat lebih tinggi (FAO 2015). Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa perubahan iklim akan meningkatkan variabilitas hasil panen tanaman di berbagai wilayah. Di negara berlintang rendah, produksi tanaman dipengaruhi secara “konsisten dan negatif”, dan di garis lintang utara, berdampak positif atau negatif terhadap produksi (Porter et al. 2014). Meningkatnya variabilitas presipitasi dan meningkatnya frekuensi kekeringan dan atau banjir umumnya mengurangi hasil panen (FAO 2016e).

Perubahan iklim juga dialami di Indonesia. Perubahan iklim menimbulkan pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim, peningkatan suhu udara dan permukaan air laut yang dapat mempengaruhi produksi pertanian dan kondisi sosial-ekonomi petani. Dampak perubahan iklim yang paling dirasakan pada sektor pertanian adalah degradasi dan penurunan kualitas sumber daya lahan dan air, infrastruktur pertanian, penurunan produksi dan produktivitas sehingga menjadikan ancaman kerentanan dan kerawanan terhadap ketahanan pangan bahkan kemiskinan.



Gambar 1. Proyeksi perubahan hasil panen



Dalam skala mikro, dampak perubahan iklim bagi sektor pertanian dapat ditunjukkan oleh adanya pergeseran dan ketidakpastian musim, munculnya berbagai varian dan jenis organisme pengganggu tanaman secara sporadis, tingkat salinitas tanah dan air yang meningkat sehingga mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas. Iklim ekstrim juga dapat menimbulkan bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan atau angin

topan yang menjadi bencana bagi kehidupan manusia.

Sektor pertanian juga dianggap penyebab perubahan iklim karena berkontribusi menghasilkan emisi gas rumah kaca 6-18%, karena penggunaan pupuk kimia (anorganik), tata guna lahan dan perubahannya. Secara konvergen hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan iklim akan mengubah pola produksi pangan global. Dampak

produktivitas tanaman diperkirakan negatif di dataran rendah dan daerah tropis namun agak positif di daerah berlintang tinggi. Konsentrasi karbon dioksida (CO2) lebih tinggi ditunjukkan pada tanaman yang menggunakan fiksasi tiga karbon (C3) seperti gandum, beras dan kedelai sehingga dapat memperburuk obesitas dan defisit gizi pada masyarakat miskin.

Di banyak wilayah di dunia, peningkatan kelangkaan air karena perubahan iklim menjadi tantangan besar dalam mengatasi ketersediaan air untuk ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan kesehatan. Perubahan iklim memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap sektor pertanian dalam dua kategori yaitu dampak biofisik dan dampak sosial ekonomi. Dampak biofisik mencakup efek fisiologis pada tanaman, hutan,

“ Dampak perubahan iklim yang paling dirasakan pada sektor pertanian adalah degradasi dan penurunan kualitas sumber daya lahan dan air, infrastruktur pertanian, penurunan produksi dan produktivitas sehingga menjadikan ancaman kerentanan dan kerawanan terhadap ketahanan pangan bahkan kemiskinan.



ternak, perubahan sumber daya lahan dan air, meningkatnya gangguan gulma penyakit, peningkatan permukaan air laut dan salinitas, serta perubahan habitat biota laut. Dampak sosial ekonomi mencakup turunnya produktivitas dan produksi, penurunan marginal GDP sektor pertanian, fluktuasi harga, perubahan distribusi geografis rejim perdagangan, meningkatnya jumlah penduduk rawan pangan, dan migrasi (FAO 2017).

Tren global dunia tersebut menghadirkan tantangan global (globalisasi, keberlanjutan, perubahan iklim, peningkatan ketimpangan) yang terkunci “lock-in” dan saling interdependensi. Beberapa tantangan global meliputi : 1) bagaimana meminimalkan dampak negatif iklim pada pasokan pangan global; 2) upaya mengurangi ketidak setaraan yang semakin meningkat di negara-negara tidak berkembang dan rentan; 3) bagaimana mengembangkan strategi pertumbuhan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan tujuan mitigasi; dan 4) mempertahankan komitmen kebijakan di dunia yang semakin dibatasi ketidakpastian, variabilitas iklim dan saling ketergantungan dengan skenario kebijakan yang lebih besar.

## 2.2 Terobosan Teknologi Meningkatkan Adaptasi Sektor Pertanian terhadap Perubahan Iklim

Untuk mendorong upaya adaptasi dan mengatasi bersama dampak perubahan iklim memerlukan dibangunnya komunikasi, difusi dan adopsi terhadap teknologi pengelolaan lahan, air, pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan. Perbaikan juga perlu dilakukan di bidang infrastruktur, penyuluhan, informasi iklim, akses permodalan dan keuangan, serta asuransi sosial sebagai penggerak pembangunan perdesaan (FAO 2016e).



Untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur usaha tani, sistem produksi, dan sosial-ekonomi, strategi pendekatan adaptasi yang dapat dilakukan antara lain teknologi prediksi iklim, pengembangan sistem jaringan iklim, pengembangan sistem peringatan dini, pengembangan sekolah lapang pertanian, penyesuaian pola tanam/kalender tanam (waktu, rotasi, jenis tanam), pengembangan varietas adaptif (VUB rendah emisi gas rumah kaca, VUB toleran kegaraman iklim, VUB tahan kering, umur genjah dan tahan genangan), serta pengembangan teknologi pengelolaan lahan, air dan Iklim (Las 2007).

Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah berbagai tindakan penyesuaian diri terhadap kejadian yang diakibatkan oleh fenomena perubahan iklim atau pemanasan global. Kemampuan adaptasi (adaptive capacity) merupakan kemampuan untuk mendesain, melaksanakan strategi adaptasi atau bereaksi terhadap bencana (kondisi yang kurang menguntungkan) sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bencana atau mengurangi besarnya kerusakan yang ditimbulkan.

Kemampuan adaptasi terkait erat dengan tingkat kerentanan (vulnerability) dan sensitivitas (sensitivity). Sensitivitas (sensitivity) merujuk pada tingkat yang menggambarkan sejauh mana suatu sistem dapat dipengaruhi berbagai sifat iklim. Kerentanan (vulnerability) menunjukkan kemampuan sistem mengatasi dampak merusak dari perubahan iklim (Boer 2008a). Sasaran adaptasi terhadap perubahan iklim pada prinsipnya meminimalkan kerentanan, membangun resiliensi dan mengembangkan kapasitas memanfaatkan situasi dan kondisi menguntungkan dari perubahan iklim (Brooks and Adger 2005).

Dua jenis adaptasi perubahan iklim yaitu autonomous adaptation dan planned adaptation. Adaptasi sektoral (otonom) adalah bentuk reaksi akibat perubahan iklim misalnya petani merubah waktu tanam, olah lahan atau waktu panen dikarenakan adanya perubahan pola curah hujan. Adaptasi ini bersifat spesifik dan terjadi dalam skala kecil atau individu. Bentuk adaptasi kedua adalah bentuk adaptasi terencana, menyeluruh dan multisektoral, misalnya kebijakan distribusi dan seleksi jenis tanaman atau bibit berdasarkan wilayah sesuai kondisi iklim disertai penyediaan akses informasi cuaca bagi petani dan pemberian skema kredit input pertanian sesuai jenis tanaman (FAO 2007). Adaptasi di sektor pertanian melibatkan infrastruktur/sarana, tata ruang, sistem produksi, dan sosial ekonomi.

Untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur usaha tani, sistem produksi, dan sosial-ekonomi, strategi pendekatan adaptasi yang dapat dilakukan antara lain teknologi prediksi iklim, pengembangan sistem jaringan iklim, pengembangan sistem peringatan dini, pengembangan

sekolah lapang pertanian, penyesuaian pola tanam/kalender tanam (waktu, rotasi, jenis tanam), pengembangan varietas adaptif (VUB rendah emisi gas rumah kaca, VUB toleran kegaraman iklim, VUB tahan kering, umur genjah dan tahan genangan), serta pengembangan teknologi pengelolaan lahan, air dan Iklim (Las 2007). Selain itu, juga telah dikembangkan kegiatan sistem budidaya dan usahatani komoditas misalnya, sekolah lapang pengelola pertanian terpadu, sekolah lapang perubahan iklim, sistem tanam benih langsung sesuai dengan kondisi lapangan dan kearifan lokal masyarakat setempat. Informasi prakiraan waktu tanam berupa penyusunan informasi peta kalender tanam untuk membantu memberikan informasi dimulainya waktu tanam secara lebih akurat.

## III. ANUGERAH LAYANAN EKOSISTEM DAN IMPLIKASINYA BAGI STRATEGI ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

### 3.1 Anugerah Layanan Ekosistem bagi Kehidupan

Layanan (jasa) ekosistem adalah beragam manfaat yang diperoleh manusia dari lingkungan alam dan ekosistem yang berfungsi dengan baik. Ekosistem yang berfungsi baik meliputi ekosistem pertanian, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput dan ekosistem perairan. Secara kolektif, manfaat ekosistem dikenal sebagai ‘layanan ekosistem’ dan seringkali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyediaan air minum bersih, penguraian limbah, dan penyerbukan alami tanaman.

Millennium Ecosystem Assessment (2006), mendefinisikan layanan

ekosistem sebagai “manfaat yang didapat manusia dari ekosistem.” Terdapat empat kategori layanan ekosistem yaitu pendukung, penyediaan, pengaturan dan budaya, dengan layanan pendukung sebagai dasar untuk layanan dari tiga kategori lainnya. Beberapa kategori layanan ekosistem adalah : (1) Layanan Pendukung (seperti daur ulang nutrisi, produksi primer dan pembentukan tanah). Dengan Layanan ini memungkinkan ekosistem menyediakan layanan seperti suplai makanan, peraturan banjir, dan pemurnian air; 2) Layanan penyediaan, berupa sumber makanan, bahan baku, sumber daya genetik, air, energi dan lain sebagainya; 3) Layanan Pengaturan, penyerapan karbon dan regulasi iklim, dekomposisi limbah dan detoksifikasi, pemurnian air dan udara serta pengendalian hama dan penyakit; serta 4) Layanan budaya, beragam budaya spiritual, rekreasi termasuk ilmu dan pengetahuan.

Contoh ilustrasi yang menggambarkan hubungan alami manusia dan layanan ekosistem adalah di New York City, saat kualitas air minum turun di bawah standar persyaratan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika, pihak berwenang memilih untuk mengembalikan DAS Catskill yang tercemar dan sebelumnya telah menyediakan layanan ekosistem pemurnian air. Setelah masukan limbah dan pestisida ke daerah aliran sungai berkurang, proses abiotik alami seperti

penyerapan tanah dan penyaringan bahan kimia, bersamaan dengan daur ulang biotik melalui sistem akar dan mikroorganisme tanah, kualitas air meningkat ke tingkat yang memenuhi standar. Biaya investasi dengan modal alam ini diperkirakan antara \$ 1-1,5 miliar USA sangat kontras dengan biaya sebesar \$ 6-8 miliar untuk membangun pabrik penyaringan air ditambah biaya tahunan \$ 300 juta.

Memahami hubungan antara keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem sangat penting bagi pengelolaan sumber daya alam dan layanan mereka. Banyak ahli ekologi meyakini bahwa penyediaan layanan ekosistem dapat distabilkan dengan keanekaragaman hayati. Meningkatnya keanekaragaman hayati juga menguntungkan layanan ekosistem yang tersedia bagi masyarakat. Konsep redundansi ekologis kadang-kadang disebut sebagai kompensasi fungsional dan mengasumsikan bahwa lebih dari satu spesies melakukan peran tertentu dalam ekosistem. Hal ini ditandai oleh spesies tertentu yang meningkatkan efisiensinya dalam memberikan layanan saat penekanan kondisi diarahkan untuk menjaga stabilitas agregat ekosistem. Hipotesis redundansi dapat dimaknai sebagai “redundansi spesies meningkatkan ketahanan ekosistem”.

Gagasan lain menggunakan analogi paku keling di sayap pesawat untuk membandingkan efek eksponensial



Memahami hubungan antara keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem sangat penting bagi pengelolaan sumber daya alam dan layanan mereka. Banyak ahli ekologi meyakini bahwa penyediaan layanan ekosistem dapat distabilkan dengan keanekaragaman hayati. Meningkatnya keanekaragaman hayati juga menguntungkan layanan ekosistem yang tersedia bagi masyarakat.





of the commons” oleh Garret Hardin (1968) kemungkinan akan terjadi. Tragedy of the common sebagai bentuk kehancuran sumber daya akibat adanya pendayagunaan yang berlebihan, dan saling independen satu sama lain.

Berpijak pada beberapa aspek tersebut, dan sebagai upaya merumuskan alternatif strategi dalam adaptasi perubahan iklim sebagaimana telah pemerintah dan berbagai pihak lakukan selama ini, penulis mengusulkan bahwa pentingnya sebuah rancangan strategi yang secara teknis, sosial ekonomi layak ditempuh sekaligus secara inherent dibangun dalam kerangka keberlanjutan lingkungan hidup secara keseluruhan, dalam sebuah kerangka adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem. Strategi adaptasi harus diimbangi dengan pembenahan dan membangun komitmen bersama individu dan berbagai pihak mulai dari tingkat mikro, meso hingga makro yaitu dimulai dari grassroots, kelompok masyarakat (komunitas) dan kelembagaan secara lokal dan daerah serta partisipasi aktif berbagai pihak termasuk swasta hingga ke tingkat yang lebih luas baik nasional maupun internasional.

Belajar dari keteraturan layanan ekosistem bagi kehidupan umat manusia, pengambilan keputusan terkait layanan ekosistem memerlukan pemilihan kompleks yang melibatkan aspek ekologi, teknologi, masyarakat dan ekonomi. Proses pembuatan keputusan layanan ekosistem harus mempertimbangkan interaksi berbagai jenis informasi, menghormati semua sudut pandang pemangku kepentingan, dan mengukur dampak pada keempat komponen baik ekologi, teknologi, masyarakat dan ekonomi.

Dalam kerangka adaptasi berbasis ekosistem, strategi adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan sinergitas dan keterpaduan antara pengembangan kapasitas masyarakat secara mandiri sesuai nilai-nilai budaya beserta mekanisme sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya perilaku kerjasama kolektif (cooperative collective behavior) untuk membangun institusi sosial dalam pengelolaan layanan ekosistem.

Dalam konteks pembangunan pertanian, orientasi membangun kapasitas petani sebagai pelaku utama pertanian agar tangguh dalam

adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem diperlukan pendekatan yang menempatkan individu sebagai titik sentral dalam seluruh kegiatan kehidupan. Pemahaman dan pembelajaran akan perubahan iklim dan dampaknya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dan kehidupan perlu terus didorong sehingga memahami hak dan kewajiban masing-masing serta bertanggungjawab bersama menciptakan keadilan dan perdamaian kehidupan di bumi.

#### IV. AGENDA KEBIJAKAN KE DEPAN

Mengacu dari pemikiran para ahli (nasional dan internasional) yang telah dibahas pada Bab-Bab sebelumnya, dapat dirumuskan langkah-langkah kebijakan strategi adaptasi perubahan iklim berorientasi pada keberlanjutan dan keseimbangan layanan ekosistem ke depan adalah sebagai berikut :

Dalam rangka membangun kebijakan dan adaptasi perubahan iklim terencana “planned adaptation”, perlu dikembangkan :



- (1) Dukungan kajian dan studi tentang kompleksitas layanan ekosistem, meliputi identifikasi penyedia layanan ekosistem, karakterisasi peran dan hubungan fungsionalnya, penentuan aspek struktur masyarakat yang mempengaruhi, penilaian faktor lingkungan abiotik, dan pengukuran skala spasial-temporal layanan ekosistem agar berfungsi baik.
- (2) Proses perencanaan kolaboratif yang melibatkan para ilmuwan, pembuat kebijakan, dan anggota masyarakat sebagai elemen penting dari “adaptasi berbasis ekosistem”.
- (3) Dimensi strategi antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara utuh (dimensi teknis, ekologi, ekonomi, lingkungan hidup dan kemanusiaan) dengan segenap dimensi struktural, sosial budaya dan kelebagaannya.
- (4) Harmonisasi kegiatan pada berbagai tingkatan (mikro dan meso) serta karakteristiknya di tingkat makro dan berbagai wilayah secara luas sehingga berkontribusi terhadap pengelolaan keberlanjutan ekosistem dan segala sumberdaya secara keseluruhan.
- (5) Penegakan aturan (enforcement) untuk tidak memanfaatkan sumber daya yang sensitif terhadap perubahan iklim misalnya inisiatif teknologi dalam pembukaan lahan dengan tidak harus membakar hutan, alokasi zona khusus cagar biosfir dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.
- (6) Alternatif kebijakan yang memberikan insentif bagi seluruh pelaku ekonomi untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sedini mungkin dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Dalam upaya mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan yang

adaptif dan partisipatif terhadap perubahan iklim, diperlukan :

- (1) Membangun kesamaan persepsi dan pemahaman yang menempatkan manfaat dan layanan ekosistem sebagai sebuah sumberdaya bersama, yang keberlanjutannya bagi kehidupan manusia sangat ditentukan oleh tindakan terkoordinasi antar individu, komunitas, wilayah bahkan antar negara.
- (2) Komitmen dan sinergi bersama dalam membangun tindakan terkoordinasi dalam membangun ketahanan iklim secara komprehensif dan diikuti dengan tindakan nyata dalam berbagai tingkatan (mikro, meso dan makro).
- (3) Mendorong upaya mempertahankan stabilitas dan layanan ekosistem melalui keanekaragaman hayati dan berfungsinya hubungan diantara mereka.
- (4) Dukungan “enabling environment” yang mencegah tindakan independen antar pengguna sehingga dicegah perilaku free rider dan over eksploitasi yang menimbulkan kerusakan. Hal ini dapat dilakukan dengan internalisasi biaya lingkungan dalam kegiatan ekonomi dan tindakan koersif dari pemerintah.
- (5) Pentingnya dibangun aturan bersama (instutusi sosial) yang melibatkan komponen nilai-nilai budaya beserta mekanisme sosial bagi tumbuhnya perilaku kerjasama kolektif dalam pengelolaan layanan ekosistem.
- (6) Pengembangan sains dan teknologi mendukung antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, antara lain penggunaan bioteknologi yang relevan dengan fungsi layanan ekosistem.

#### V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perubahan iklim sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari kontribusi berbagai aktivitas manusia dalam mengeksploitasi berbagai sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestariannya bagi kehidupan. Dengan berprinsip dan belajar pada keseimbangan dan keberlanjutan manfaat layanan ekosistem sebagai anugerah bagi kesejahteraan umat manusia, menjadi urgent untuk merancang arah kebijakan mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan yang adaptif dan partisipatif dalam menghadapi perubahan iklim dengan berorientasi pada keberlanjutan dan keseimbangan layanan ekosistem.

Dimensi strategi antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara utuh tidak hanya memiliki dimensi teknis, namun juga melibatkan aspek ekologi, ekonomi, lingkungan hidup dan kemanusiaan dengan segenap dimensi struktural, sosial budaya dan kelebagaannya. Hal ini akan berimplikasi pada aspek teknis, manajemen dan kebijakan penguatan kapasitas individu, kelompok dan kelembagaan serta seluruh pelaku ekonomi sehingga dapat dirumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan secara praktis dan berkelanjutan. Memperbaiki strategi kebijakan ke depan agar terbangun pilihan strategis yang dapat diterapkan dengan baik, disarankan melibatkan kerangka kerja layanan ekosistem untuk melindungi lingkungan dan mempertahankan keberlanjutannya.

Dalam kerangka implementasinya, kebijakan dan strategi adaptasi perubahan iklim berbasis layanan ekosistem perlu dirumuskan ke dalam bentuk program dan kegiatan adaptasi perubahan iklim yang terencana “planned adaptation” dan didukung dengan terbangunnya



enabling environment sehingga dapat mendorong terbangunnya tindakan kolektif membangun ketahanan iklim bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Belajar dari “best practice” dalam pengelolaan perubahan iklim dan diperkuat oleh pendapat ahli berbagai bidang disiplin, mengisyaratkan bahwa tindakan kolektif menjadi kunci keberhasilan pengelolaan layanan ekosistem dan keberlanjutan pemanfaatannya. Untuk itu, pentingnya komitmen dan sinergi bersama membangun tindakan kolektif menghadapi perubahan iklim bersama berbagai pihak, lembaga dan institusi pada berbagai tingkatan mulai dari mikro (individu, rumah tangga), meso (kelompok, komunitas) hingga level makro pada skala yang lebih luas baik wilayah, nasional hingga internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

de Boer, B. (2008a). The acoustic role of supralaryngeal air sacs. Paper presented at the Acoustics '08, Paris, France.

Brooks, N., Adger, W.N. and Kelly, P.M. (2005). The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level and the implications for adaptation. *Global Environmental Change* 15 (2), 151-163.

Christoper JN, Gibbs, Bromley DW. 1989. Institutional Arrangement for

Management of Rural Resources: Common-Property Regimes. Di dalam Fikret B, editor. *Common Property Resources : Ecology and Community-Based Sustainable Development*. London (UK): Belhaven Press.

FAO, 2007. *Adaptation to Climate Change in Agriculture, Forestry and Fisheries: Perspective, Framework and Priorities*, Interdepartmental Working Group on Climate Change, Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, Rome.

FAO, 2016e. *Climate change and food security: risks and responses*. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2016

FAO, 2017. *The Future of Food and Agriculture Trend and Challenges*. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2017

IFPRI. 2017. *Global Futures and Strategic Foresight*. <http://globalfutures.cgiar.org/strategic-foresight>

IFPRI Climate Change. 2014. Project: *Global Agricultural Model Intercomparisons*. Washington, D.C.

Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, 2007

Las, Irsal. 2007. Menyiasati Fenomena Anomali Iklim Bagian Pemantapan Produksi Padi Nasional pad Era Revolusi Hijau Lestari. *Jurnal Biotek-*

LIPI. Naskah Orasi Penguahan Profesor Riset, 6 Agustus 2004

Millennium Ecosystem Assessment (MA). 2005. *Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis* [1]. Island Press, Washington. 155pp.

Ostrom E. 1992. *The Rudiments of a Theory of the Origins, Survival, and Performance of Common-Property Institutions*. Di dalam Daniel WB, editor. *Making the Commons Work Theory, Practice, and Policy*. United States (US): Institute for Contemporary Studies Press.

Ostrom E, Gardner R, Walker J. 1994. *Rules, Games, and Common-Pool Resources*. United States (US): Ann Arbor The University of Michigan Press

Porter, J.R., Xie, L., Challinor, A.J., Cochrane, K., Howden, S.M., Iqbal, M.M., Lobell, D.B. & Travasso, M.I. 2014. *Food security and food production systems. Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability*. Cambridge, UK, and New York, USA, Cambridge University Press.

UNDP Indonesia. Sisi lain Perubahan Iklim Mengapa Indonesia harus Beradaptasi untuk Melindungi Rakyat Miskinnya, 2007.

USAID 2011. *Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana*.

Salles, J-M, “Valuing biodiversity and ecosystem services: Why put economic values on Nature?” *Comptes Rendus Biologies* 334(5–6): 469–82, 2011.

Trenberth, K. E., J. T. Houughton, and L. G. Meira Filho. 1995. *The Climate System: an Overview*. In: *Climate Change 1995. The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. Cambridge University Press.



# ALSINTAN MENJADI LANGKAH AWAL MENUJU PERTANIAN MODERN

Hendy Fitriandoyo  
(Perencana Madya, Biro Perencanaan)



Menteri Pertanian Amran mengatakan, penggunaan mekanisasi pertanian bisa menurunkan biaya produksi 30-40% dan secara otomatis meningkatkan pendapatan petani. Selain itu juga dapat mengurangi losses menjadi dua persen dari yang biasanya bisa mencapai 10%, jadi dapat menyelamatkan delapan persen hasil panen. Kalau delapan persen dikalikan gabah produksi nasional 70 juta berarti ada 5 juta gabah bisa diselamatkan. Kalau disetarakan dengan nominal uang, lebih dari Rp 20 triliun yang dapat diselamatkan, oleh karena itu untuk solusi ke depan adalah pertanian modern.





## PENDAHULUAN

Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, efektivitas, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus meningkat dan terpelihara. Selain itu pertanian modern juga dicirikan oleh: (a) pemanfaatan inovasi berbasis bio science dan bio energi, (b) adaptif dan tahan terhadap perubahan iklim, (c) penggunaan alat mesin/mekanisasi pertanian, dan (d) adanya dukungan teknologi informasi (IT). Oleh sebab itu, untuk menuju pertanian modern, salah satu yang diprioritaskan pemerintah adalah penggunaan teknologi mekanisasi pertanian. Dengan mekanisasi pertanian diharapkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas penggunaan sumberdaya dapat ditingkatkan. Selain itu ketepatan waktu dalam aktivitas pertanian dapat lebih ditingkatkan. Harus diakui petani di Indonesia mayoritas adalah petani tradisional, baik dari mulai bertanam hingga proses pemanenan. Dengan



“  
.....  
Harus diakui petani di Indonesia mayoritas adalah petani tradisional, baik dari mulai bertanam hingga proses pemanenan.  
.....

berkembangnya teknologi, petani juga harus mengubah kebiasaan tersebut. Petani harus bergerak dengan teknologi terbaru dalam bercocok tanam.

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, pemerintah banyak menggelontorkan bantuan mekanisasi pertanian ke petani. Tahun 2015 menjadi tonggak bangkitnya modernisasi pertanian di Indonesia. Makin berkurangnya tenaga kerja membuat pengolahan lahan untuk usaha tani padi menjadi sulit. Karena itu modernisasi pertanian melalui mekanisasi merupakan solusi yang efisien menggantikan pola usaha tani manual dan mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kerja. Pemerintah

memang telah menggerakkan mekanisasi, namun dalam jumlah terbatas. Beberapa jenis alsintan meliputi Rice Transplanter, Combine Harvester, Dryer, Power Thresher, Corn Sheller, Rice Milling Unit (RMU), traktor dan pompa air.

### MEKANISASI MAMPU MENGHEMAT BIAYA

Permasalahan usaha pertanian Indonesia dihadapkan pada keterbatasan tenaga kerja dan semakin mahalnya ongkos tenaga kerja, oleh karenanya untuk mencapai target



produksi pertanian yang efisien diperlukan modernisasi pertanian melalui mekanisasi. Tenaga kerja di bidang pertanian, khususnya yang langsung terjun ke sawah semakin hari ternyata kian minim. Dari beberapa hasil survei mengatakan bahwa, tenaga kerja di bidang pertanian kini didominasi orangtua yang berusia lebih dari 50 tahun. Alasan utama regenerasi tak berjalan, karena menjadi petani bukanlah pekerjaan impian kalangan muda. Apalagi ada kesan kotor dan bau lumpur. Jadi tidak heran, pekerjaan petani makin ditinggalkan karena dianggap tidak menjanjikan. Lambat-laun, pekerjaan menjadi seorang petani punah dan tentu berpengaruh kepada hasil. Untuk mengatasi minimnya tenaga kerja, penerapan pertanian modern yang menitikberatkan kepada penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) atau mekanisasi menjadi solusi jitu yang harus diterapkan. Selain itu, dengan konsep pertanian modern dapat menjadi momentum menarik minat pemuda. Dengan beralihnya ke mekanisasi, diharapkan dapat membayar tenaga kerja petani lebih tinggi.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, bahwa mekanisasi mampu menghemat biaya olah tanah, biaya tanam dan biaya panen sebesar Rp 2,2 juta/ha dari pola manual Rp 7,3 juta/ha. Dengan demikian total biaya produksi menjadi Rp 5,1 juta/ha. Bila mengolah tanah secara manual memerlukan 20 orang hari kerja per hektar dan biaya Rp 2,5 juta/ha. Jika menggunakan traktor, satu orang mampu menyelesaikan 3 ha/ha dengan biaya Rp 1,8 juta/ha. Mekanisasi tidak hanya dilakukan untuk mengolah tanah, namun juga untuk menanam padi dengan menggunakan rice transplanter. Alat ini mampu menghemat tenaga dari pola manual 19 orang/ha menjadi 7 orang/ha. Biaya tanam juga menurun dari Rp 1,72 juta menjadi Rp 1,1 juta/ha.

Mekanisasi untuk menyangi rumput (power weeder) mampu menghemat tenaga kerja dari pola manual 15 orang menjadi 2 orang/ha. Biaya menyangi turun dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 510 ribu/ha. Alat mekanisasi untuk panen padi, yaitu combine harvester mampu menghemat tenaga kerja dari pola manual 40 orang menjadi 7,5 orang/ha. Biaya panen dapat ditekan dari Rp 2,8 juta menjadi Rp 2,2 juta/ha. Dengan alat ini mampu menekan losses dari 10,2% menjadi 2%. Intinya modernisasi membuat usaha pertanian lebih efisiensi, produktif, berdaya saing, pendapatan tinggi dan meningkatkan nilai tambah.

“  
.....  
Prasyarat pengembangan mekanisasi pertanian adalah pendataan penyebaran alsintan secara akurat, adanya fasilitas penyediaan alsintan, konsolidasi lahan pertanian, kemudahan akses perbankan.  
.....

Peluang pengembangan mekanisasi pertanian, bukan sebatas kondisi tenaga kerja di bidang pertanian yang makin berkurang, tapi ada faktor lainnya. Alsintan memiliki keunggulan secara teknis maupun ekonomis. Selain itu, kemampuan industri dalam negeri memproduksi alsintan yang bermutu juga kian berkembang, adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan alsintan, dan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengembangan alsintan. Prasyarat pengembangan mekanisasi pertanian adalah pendataan penyebaran alsintan secara akurat, adanya fasilitas penyediaan alsintan, konsolidasi lahan pertanian, kemudahan akses perbankan. Selain itu, dukungan kebijakan industri alsintan, perdagangan alsintan, dan dukungan terhadap pengawasan, peredaran, serta penyuluhan alsintan. Biasanya untuk fasilitas penyediaan alsintan ini dapat melalui bantuan dari pemerintah pusat/daerah, optimalisasi kinerja UPJA (Usaha Pelayanan Jasa

Alsintan), fasilitas perbengkelan dan ketersediaan suku cadang dengan harga yang terjangkau.

### ANGGARAN ALSINTAN TAHUN 2016-2017

Kementan telah menganggarkan Rp 2,9 triliun untuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) sebanyak 79.000 unit pada 2017. Jumlah anggaran ini meningkat dibanding di 2016 yang sebesar Rp 2,7 triliun. Anggaran diperuntukkan untuk pengadaan traktor roda dua sebanyak 25.000 unit, traktor roda empat tanaman pangan

3.000 unit, pompa air 21.000 unit, rice transplanter 3.000 unit, excavator 150 unit, cultivator 2.000 unit dan hand sprayer 25.000 unit. Dari sejumlah jenis alsintan yang diadakan untuk petani, sebagian besar merupakan hasil produksi dalam negeri. Hanya traktor roda empat dan excavator yang hingga saat ini masih impor. Excavator terbanyak dari Jepang, Traktor ada dari Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Adapun impor excavator dari 150 unit, baru tersedia 100 unit, dan traktor roda empat sebanyak 1600 unit. Impor alsintan dilakukan pada alat-alat mesin pertanian yang memang belum bisa diproduksi oleh Indonesia. Industri dalam negeri belum memiliki kapasitas untuk memproduksi dua jenis alat tersebut. Sementara itu, pemanfaatan alsintan dalam sektor pertanian di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan nilai efisiensi biaya produksi, efisiensi waktu, serta meningkatkan daya saing hasil produksi pertanian.



Namun tidak selamanya bantuan itu membuat petani senang. Salah satunya bantuan alat mesin pertanian, combine harvester. Peralannya, alat bantu panen itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, alat mesin pertanian impor dari China dan Jepang tersebut, bukan hanya terlalu besar, tapi juga tidak sesuai dengan agroekosistem di Indonesia. Saat masuk ke sawah amblas dan tidak bisa berjalan lagi sehingga banyak yang tidak menggunakannya.

Belajar dari hal tersebut, BBP Mektan sudah melakukan rekayasa dengan mengembangkan mini combine harvester yang sesuai dengan kondisi lahan sawah di Indonesia. Jika combine harvester impor mempunyai tekanan (ground pressure) lebih dari 0,5 kg/cm<sup>2</sup>, maka produk hasil rakayasa BBP Mektan hanya 0,14 kg/cm<sup>2</sup>. Bahkan tekanan ke tanah tersebut lebih rendah dari tekanan kaki manusia yang besarnya 0,25 kg/cm<sup>2</sup>. Dengan ukuran yang tidak terlalu besar, bobot mini combine harvester hanya sekitar 800 kg dengan kapasitas kerja 7-8 jam/ha



“ Dari sejumlah jenis alsintan yang diadakan untuk petani, sebagian besar merupakan hasil produksi dalam negeri. Hanya traktor roda empat dan excavator yang hingga saat ini masih impor. Excavator terbanyak dari Jepang, Traktor ada dari Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat.

dan mesin kekuatan 13,2 PK. Kelebihan lainnya adalah bisa melewati galengan, sehingga cocok untuk lahan petani yang sempit dan dibatasi galengan dan konsumsi solarnya juga irit, hanya 1,25 liter per jam. Dengan mini combine harvester ini, diharapkan panen padi bisa optimal, terutama saat musim hujan. Artinya, petani bukan hanya bisa panen dengan baik saat musim kemarau, tapi juga saat musim hujan. Apalagi selama ini kehilangan hasil saat panen masih tinggi yakni sebesar 10%. Karena itu dengan menggunakan alat panen tersebut, susut hasil panen bisa berkurang hingga 400-500 kg/ha. Kalkulasinya, jika produktifitas

tanaman padi rata-rata 5,1 ton/ha, maka dengan menyelamatkan 500 kg/ha atau 10% akan ada tambahan produksi padi cukup besar.

### ALSINTAN DAN PENCAPAIAN HASIL

Pada era pemerintahan Jokowi-JK yakni pada 2014 hingga 2017, Kementan telah menyalurkan bantuan alsintan 284.436 unit atau naik 2.175 persen dari 2014 yang hanya 12.501 unit. Hasilnya, produksi pangan strategis meningkat secara signifikan. Misalnya produksi padi 2017 sebesar 81,5 juta ton naik 15,1% dari 2014, jagung 26,0 juta ton



naik 36,9%, aneka cabai 1,90 juta ton naik 1,5% dan bawang merah 1,42 juta ton naik 15,3% dari 2014. Adapun nilai tambah dari penyaluran alsintan yakni terjadi peningkatan produksi dari tahun 2014 hingga 2016 untuk 43 komoditas mencapai Rp 288 triliun. Selain itu, Kementan juga berhasil meningkatkan luas tambah tanam (LTT) menjadi 16,39 juta ha meningkat 2,34 juta ha atau 16,65% serta Indeks Pertanaman (IP) 1,73 persen atau meningkat 2,95 persen. Karena itu, sejak 2016 tidak impor beras, cabai segar, dan bawang merah. Kemudian impor jagung 2016 sebesar 1,13 juta ton turun 62 persen dari 2015 sebesar 3,26 juta ton dan tahun 2017 tidak impor jagung dan gandum pakan ternak, sehingga hemat devisa 10,6 triliun.

### KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

Peran perguruan tinggi dalam pembangunan pertanian tak bisa diabaikan, karena itu civitas akademika diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan pertanian dengan mengembangkan inovasi teknologi pertanian serta bersinergi menciptakan dan mengembangkan teknologi mekanisasi pertanian serta pendampingan. Hal ini untuk meningkatkan produksi pangan dan keberlanjutan swasembada pangan. Teknologi mekanisasi tersebut mencakup dari hulu sampai hilir sehingga tidak hanya meningkatkan produksi, akan tetapi kesejahteraan petani.

Kementan dalam tiga tahun terakhir telah menuntaskan lima masalah klasik pertanian Indonesia yakni irigasi, sawah, pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) dan penyuluhan sehingga hasil produksi pangan strategis meningkat. Kementan telah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri, diantaranya



IPB, UGM, Unhas, Unbraw dan Unila. Untuk itu sangat diharapkan dukungan perguruan tinggi, terutama dalam kegiatan pada hilirisasi hasil penelitian. Harapannya adalah agar bangsa Indonesia tidak tergantung pada produk impor dan mampu membuka lapangan kerja bagi industri teknologi pertanian. Pada gilirannya bermanfaat bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi pangan, sehingga target swasembada pangan dapat terwujud dalam dua tahun ke depan.

### DUKUNGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ALSINTAN

Kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian haruslah merupakan kebijakan yang integral dengan kebijakan pembangunan pertanian menuju ke revitalisasi pertanian. Karena itu, sebagai supporting system posisi

mekanisasi pertanian harus kuat dalam menopang modernisasi. Sekaligus memberdayakan dan memihak petani yang posisi tawarnya lemah. Kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian harus mampu menumbuhkan. Pertama, peningkatan produktivitas baik pada sumberdaya lahan dan tenaga kerja. Kedua, peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan meningkatkan mutu produk dengan nilai tambah tinggi, sehingga memiliki daya saing. Ketiga, mampu mendorong bertumbuhkembangnya industri alat dan mesin dalam negeri secara efisien. Kualitasnya yang dapat diunggulkan dan dapat dijangkau petani. Keempat, mendorong kemitraan antara industri besar dan industri kecil pengrajin alsintan. Dengan demikian, terjadi harmonisasi dalam pendalaman industri yang saling menguatkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan mekanisasi pertanian diperlukan dukungan kebijakan

“ Peran perguruan tinggi dalam pembangunan pertanian tak bisa diabaikan, karena itu civitas akademika diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan pertanian dengan mengembangkan inovasi teknologi pertanian serta bersinergi menciptakan dan mengembangkan teknologi mekanisasi pertanian serta pendampingan



pemerintah. Pertama, infrastruktur untuk mendukung revitalisasi pertanian seperti pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, dan sumber air lainnya. Selain itu, jalan dan jembatan untuk sarana transportasi alat dan mesin pertanian serta produk pertanian perlu diprioritaskan. Kedua, teknologi mekanisasi dan produksi alat dan mesin pertanian diupayakan dari dalam negeri. Bukan hanya mendukung pengembangan komoditas, tapi juga mendorong tumbuhnya industri alat dan mesin dalam negeri. Ketiga, mempermudah akses perbankan untuk mendapatkan kredit alat dan mesin pertanian dan kredit bagi bengkel pembuat alat dan mesin pertanian. Keempat, untuk memasyarakatkan penggunaan alsintan pertanian sangat diperlukan bantuan dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan ada lima (5) poin penting guna mewujudkan keberlanjutan swasembada pangan. Salah satu pointnya adalah Paket teknologi mekanisasi pasca panen yang dapat menurunkan kehilangan dan meningkatkan kualitas produksi. Misalnya mekanisasi pada padi, sudah hasilkan padi berkualitas bahkan beras sudah diekspor, akan tetapi tugasnya

tidak hanya paket teknologi pada padi, namun untuk semua komoditas pangan, sehingga diharapkan juga disusun program mengkorporasikan petani. Pemasnya mekanisasi merupakan faktor pendukung utamanya, disampaikan aspek permodalan, tataniaga, dan manajemen modern. Jadi, bagaimana menjadikan skala usaha tani dapat optimal dan pengelolaan korporasi yang tepat bagi petani.

### MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN ALSINTAN DENGAN BRIGADE ALSINTAN DAN UPJA

Sungguh ironis melihat ribuan alat dan mesin pertanian (alsintan) hanya dibiarkan menganggur. Dari survei di lapangan banyak alat tractor yang tidur, kalau sudah begini, negara yang rugi karena uang negara banyak terbuang percuma. Pemberian bantuan alsintan ke petani, bertujuan memaksimalkan peningkatan produksi. Sayangnya, kelompok petani penerima lebih membiarkan alsinnya tidur daripada dipinjamkan ke kelompok lainnya untuk dimanfaatkan. Padahal, untuk pengadaan alsintan ini, pemerintah sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

#### • Brigade Alsintan

Untuk memaksimalkan penggunaan alsintan Kementerian Pertanian membentuk Brigade Alsintan serentak di 34 provinsi. Diharapkan dari pembentukan Brigade Alsintan, yang dituangkan dalam regulasi manajemen alsintan berupa Perda atau Perbub tentang UPT Alsintan sehingga dapat memberikan contoh dalam pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani dan kelompok organisasi masyarakat lainnya, bagaimana menata dan pengelolaan bantuan alat pertanian (sistem pinjam) menjadi lebih baik, sehingga pemanfaatan pertanian lebih terukur dan terjangkau dari segi fungsinya di masyarakat.

Dari pengelolaan alsintan melalui brigade alsintan, artinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong percepatan olah tanah, tanam, panen secara serentak untuk mencapai produksi pertanian lebih optimal. Selanjutnya, kelompok tani yang akan memikirkan atau merencanakan penggunaannya, dan masyarakat yang merencanakan pembiayaan perawatan dan biaya operasional lainnya. Nah di sini diharapkan keterlibatan pemuda untuk menjadi operator.

#### • Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Keberadaan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) dilatarbelakangi oleh adanya suatu peluang usaha dimana terdapat kesenjangan antara kebutuhan alsintan (alat mesin pertanian) dengan ketersediaan alsintan di suatu wilayah. Padahal alsintan sangat dibutuhkan petani untuk mempercepat pengolahan tanah, penyediaan air, peningkatan indeks pertanaman, mengurangi kehilangan hasil dan sebagainya dalam rangka efisiensi usaha tani. Sementara itu, petani tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli alsintan sendiri. Oleh karena itu, UPJA



diperlukan petani sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan alsintan. Dengan menggunakan jasa alsintan UPJA, petani hanya mengeluarkan biaya jasa sewa (sesuai kesepakatan) tanpa harus membeli alsintan sendiri.

Usaha pelayanan jasa alsintan merupakan sebuah peluang bisnis di pedesaan. Jika UPJA yang sudah ada dikelola secara optimal, maka pendapatan UPJA bisa meningkat, akses petani terhadap alsintan semakin mudah dan bisa menyerap tenaga kerja pedesaan lebih banyak. Oleh karena itu, Pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian harus terus berupaya membina UPJA di wilayahnya agar menjadi UPJA yang mandiri dan profesional. Berdasarkan hasil pemantauan di tingkat petani, usaha tani menjadi lebih efisien dengan penggunaan jasa alsintan UPJA.

### KEMENTAN SEBAR ALAT MESIN PERTANIAN DI KAB TUBAN - JATIM.

Kementan terus berupaya menggenjot hasil produksi pangan di berbagai

daerah. Untuk mencapai target ini, Kementan memberikan bantuan berbagai jenis peralatan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani di berbagai daerah. Mulai dari peralatan prapanen seperti traktor, pompa air, alat penanaman padi (transplanter), cultivator, excavator, chopper, dan juga alat penyebaran benih (hand sprayer). Selain itu, juga ada bantuan peralatan



Sistem panen dengan menggunakan mesin combine harvester untuk lahan satu hektare bisa menghasilkan gabah kering panen sekitar 6 ton sedangkan dengan cara konvensional hasilnya tidak sampai 6 ton. Untuk itu diharapkan bantuan alsintan terus dilakukan sehingga kesejahteraan petani di daerah terus bisa ditingkatkan.

atau mesin pascapanen seperti combine harvester, alat pengering padi, dan sejumlah peralatan lainnya.

Pengembangan mekanisasi pertanian ini untuk meningkatkan produksi dan juga mutu hasil pertanian yang berdaya saing tinggi. Misalnya di Kabupaten Tuban ini, dengan penggunaan mesin panen combine harvester, tingkat produksinya bisa meningkat hingga

10%. Dengan mengoptimalkan penggunaan mesin pertanian, para petani dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, meningkatkan intensitas penanaman, efisiensi biaya produksi, penyelamatan kehilangan hasil, meningkatkan mutu hasil, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan para petani. Ada sejumlah komoditi pertanian yang

diharapkan bisa swasembada seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, sapi dan tebu.

Bantuan alsintan yang diberikan kepada para petani di daerah sangat membantu meningkatkan hasil pertanian. Sistem panen dengan menggunakan mesin combine harvester untuk lahan satu hektare bisa menghasilkan gabah kering panen sekitar 6 ton sedangkan dengan



cara konvensional hasilnya tidak sampai 6 ton. Untuk itu diharapkan bantuan alsintan terus dilakukan sehingga kesejahteraan petani di daerah terus bisa ditingkatkan. Saat ini, di wilayah Tuban dengan luasan lahan padi sekitar 56.000 hektare, luas lahan tanamnya bisa 103.000 hektare dari target 101.000 hektare, bahkan hasil panennya sudah surplus 54%.

## PENUTUP

Melalui pelaksanaan program Upsus, pemerintah berkeinginan upaya peningkatan produksi padi dilakukan berbarengan dengan langkah-langkah nyata untuk menekan kehilangan hasil panen. Untuk memperkecil kehilangan hasil, maka penggunaan alsintan dalam kegiatan panen padi perlu lebih dioptimalkan. Penggunaan mekanisasi pertanian tak bisa ditawar lagi. Makin berkurangnya tenaga kerja membuat pengolahan lahan untuk usaha tani padi menjadi sulit. Karena itu modernisasi pertanian melalui

mekanisasi merupakan solusi yang efisien menggantikan pola usaha tani manual dan mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kerja.

Banyak keuntungan pemakaian alsintan dalam usaha tani, dari mulai tanam hingga panen. Namun yang pasti, dengan alsintan, pekerjaan bertani menjadi lebih efisien dan efektif. Keuntungan lainnya, biaya usaha tani bisa menjadi lebih murah. Dengan penggunaan alsintan petani dapat mengurangi biaya produksi petani hingga 30%, begitu pula produksinya juga meningkat, sehingga berimbas ke petani yakni kesejahteraan meningkat. Penggunaan alsintan menjadi langkah awal menuju pertanian yang lebih modern. Artinya, bukan hanya didominasi tenaga manusia, tapi tenaga mesin juga mulai berkiprah di lahan pertanian. Hal ini sesuai dengan satu cita-cita bersama, yakni menuju kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Modernisasi pertanian merupakan salah satu tolak ukur terciptanya cita-cita tersebut.

## SUMBER BACAAN

- 1) Kementan Gandeng Perguruan Tinggi untuk Capai Swasembada Pangan, Kompas.com 9 Pebruari 2015
- 2) Tahun Bangkitnya Modernisasi Pertanian, Tiara Dianing Tyas, Tabloid Sinar Tani, Kamis, 29 Oktober 2015.
- 3) Peran Akademisi Dibutuhkan Mewujudkan Swasembada Pangan di Kalimantan, betaEnews.com, 11 Oktober 2016.
- 4) Kembangkan Alat Pertanian Kementan Gandeng IPB, Niken Widya Yunita - detikFinance.com, Senin 23 Oktober 2017.
- 5) Humbahas Bentuk Brigade Alsintan, Harian.Analisadaily.com, 24 Agustus 2017



# KAJIAN PERAN PENYULUH PERTANIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN

Khairunas  
(Perencana Madya, Biro Perencanaan)



## Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk : 1) mengevaluasi konsistensi kebijakan pemberdayaan penyuluh pertanian ditinjau dari perspektif regulasi dan kelembagaan, 2) mengefektifkan kinerja penyuluh pertanian dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta daya saing produk pertanian, dan 3) menginventarisir masalah dan kendala implementasi penyuluhan pertanian di daerah.

Sumber data menggunakan data dan informasi sekunder yang diperoleh dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan data lainnya sesuai kebutuhan. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan studi literatur.



Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Undang Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K); serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tampaknya belum memberikan ruang bagi penyuluh untuk dapat bekerja dengan baik sesuai kebutuhan petani. Dalam hal ini termasuk menjawab kebutuhan untuk membuat penyuluh lebih progresif dalam pencapaian target produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Hal ini digambarkan bahwa selama 5 (lima) periode implementasi kebijakan penyuluhan tercermin belum konsistennya pemerintah dalam pemberdayaan penyuluh. Dampaknya adalah kinerja penyuluh pertanian berfluktuasi sesuai irama kebijakan dalam setiap periode.

Dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing komoditas pertanian, pemerintah belum dapat memanfaatkan potensi penyuluh pertanian secara maksimal pada hal peran penyuluh pertanian bukan saja sebagai penyuluh, namun juga sebagai penasehat, teknisi, penghubung, organisator dan agen pembaruan. Sehingga dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawalan terhadap program pemerintah, diperlukan keterampilan, pengetahuan terhadap teknologi spesifik lokasi dan melakukan pendekatan dan komunikasi dalam hubungannya dengan petani. Petani lemah dalam hal hilirisasi (pengolahan, pemasaran dan harga), artinya penyuluh belum di berdayakan secara maksimal untuk subsektor hilir. Sementara dari sisi kelembagaan petani khususnya kelompok tani dan gapoktan dapat dibuktikan dengan masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait. Untuk memperkuat kinerja penyuluh dalam pengembangan daya saing komoditas pertanian, kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan

petani saling bersinergi dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, daya saing, kewirausahaan petani, dan pengembangan kemitraan.

## PENDAHULUAN

Hingga saat ini, penyuluh pertanian memegang peran penting dan strategis dalam menyukseskan pembangunan pertanian. Karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian termasuk penyuluh melalui penyelenggaraan diklat secara terstruktur dan tematik merupakan salah satu pilihan strategis. Hal ini termasuk salah satu upaya pemberdayaan penyuluh yang sistematis dan profesional sesuai spesifikasi keilmuan yang dimiliki. Namun yang menjadi perhatian kita ke depan adalah bahwa selama ini

“

Dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing komoditas pertanian, pemerintah belum dapat memanfaatkan potensi penyuluh pertanian secara maksimal pada hal peran penyuluh pertanian bukan saja sebagai penyuluh, namun juga sebagai penasehat, teknisi, penghubung, organisator dan agen pembaruan.

penguatan sektor pertanian terlalu fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas (hulu dan on-farm). Petani dimanjakan dengan sejumlah bantuan diantaranya : program subsidi pupuk, subsidi benih, Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), pemberian alat mesin pertanian dan lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Kebijakan ini telah berlangsung cukup lama dan menelan biaya cukup besar dengan harapan tercapainya target swasembada pangan. Tidak dipungkiri, bahwa dalam kebijakan tersebut tersirat keinginan besar dari pemerintah untuk membantu meringankan beban petani dalam menjalankan usahatani.

Dalam perjalanannya, implementasi kebijakan tersebut tidak selamanya memberikan hasil maksimal khususnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Disisi lain, ternyata subsektor hilir dan penunjangnya memiliki arti penting dalam meningkatkan daya saing produk pertanian. Dalam posisi ini, peran penyuluh pertanian menjadi penting karena penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal yang ditujukan kepada para petani dengan tujuan jangka pendek sebagai upaya merubah perilaku, tindakan, sikap dan pengetahuan yang lebih dalam bertani serta tujuan jangka panjang petani diharapkan dapat hidup sejahtera. Peran penyuluh terkait dengan pengembangan subsektor hilir diantaranya : menjembatani petani dalam pengolahan hasil, akses pasar dan harga. Hal ini menjadi penting apalagi

kalau penyuluh dibekali pengetahuan terkait aplikasi teknologi pertanian yang mudah dipahami petani sebagai media informasi dalam menjalankan bisnis usahatani.

Sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, telah diatur bahwa setiap desa wajib memiliki satu penyuluh. Namun ketentuan ini belum sepenuhnya dapat diakomodir pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini tercatat dari 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian, baru tersedia 44.000 tenaga penyuluh pertanian. Jumlah



tenaga penyuluh yang berstatus pegawai negeri sipil saat ini mencapai 25.000 orang, sedangkan yang bersatus tenaga harian lepas (THL) berjumlah 19.000 orang. Dari 44.000 orang tenaga penyuluh pertanian, 32.000 orang di antaranya yang bersentuhan langsung dengan petani di lapangan. Seorang penyuluh harus menangani petani di tiga desa sehingga membuat pendampingan tidak berlangsung efektif dan optimal. Imbasnya adalah produksi pertanian tidak masimal dan kesejahteraan petani tidak tercapai. Untuk mengatasi kekurangan tenaga

Sejalan dengan terbitnya Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomen Klatour, tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga penyuluhan pertanian yang sebelumnya berdiri sendiri yakni Bakorluh pertanian (provinsi) dan Bapeluh pertanian (kabupaten), sekarang bergabung dengan dinas urusan pertanian di provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini membuat ruang gerak lembaga penyuluhan pertanian semakin terbatas. Padahal diberbagai negara

“

Melalui pengembangan pupuk organik diharapkan petani dapat menggunakan pupuk secara proporsional, sehingga dapat menjaga keseimbangan unsur hara mikro dalam tanah.

penyuluh, Kementerian Pertanian tidak hanya mengandalkan penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas (THL), dan swasta, namun tengah menumbuhkembangkan penyuluh swadaya. Secara keseluruhan Kementerian Pertanian hingga saat ini belum dapat memenuhi ketentuan setiap desa satu penyuluh pertanian.

seperti Thailand, sebanyak 70% dari keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian sendiri memiliki fungsi untuk membina petani dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani. Seiring berjalannya waktu, kelemahan yang dialami penyuluh di lapangan perlu

menjadi perhatian ekstra Kementerian Pertanian termasuk mencari solusi dalam penguatan pemberdayaan penyuluh. Ke depan produk pertanian Indonesia harus mampu bersaing dengan produk dari negara lain, sehingga peran penyuluh pertanian perlu dimaksimalkan baik di subsektor hulu, on-farm, dan hilir dengan dukungan teknologi dan pembiayaan yang memadai.

## PERMASALAHAN

Justifikasi akan pentingnya kebijakan pemberdayaan penyuluh pertanian dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, mengingatkan banyaknya permasalahan yang ditemui di lapangan. Berdasarkan studi literatur dan hasil kunjungan lapangan ke berbagai daerah di Indonesia, ternyata permasalahan penyuluhan pertanian diantaranya adalah : 1) tidak semua penyuluh memiliki kompetensi keilmuan sesuai yang diharapkan, 2) kinerja penyuluh menurun seiring dengan profesi penyuluh banyak yang menganggap hanya sebagai batu loncatan untuk menjadi pegawai negeri sipil, 3) kurangnya tenaga penyuluh pertanian, bisa disebabkan karena ketersediaan anggaran maupun penyuluh banyak yang sudah pensiun, 4) sistem koordinasi penyuluhan pertanian yang belum begitu baik dengan lembaga lain seperti litbang pertanian, perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat. Padahal seharusnya para penyuluh dapat menggunakan hasil penelitian dari lembaga tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Hal inilah yang mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum maksimal dapat dilaksanakan, 5) program penyuluhan yang belum tersampaikan secara merata ke daerah, 6) adanya perubahan transisi lembaga penyuluhan



yang tadinya berdiri sendiri, namun saat ini diintegrasikan dengan dinas, dan 7) tugas dan wilayah binaan penyuluh yang semakin meningkat yang orientasinya target provinsi. Atas kondisi ini, bargaining power yang dimiliki oleh para petani menjadi sangat lemah, sehingga nilai jual dari produk juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ini. Dengan adanya permasalahan tersebut strategi apa yang dilakukan untuk pemberdayaan penyuluh ? intervensi apa yang dibutuhkan ? dan bagaimana peran kelembagaan ?



### KONSISTENSI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF REGULASI DAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Membangun pertanian berarti membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas baik petani maupun penyuluh agar kemampuan dan kompetensi kerjanya dapat meningkat, kooperatif, inovatif dan kreatif. Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian. Namun yang sangat dipentingkan adalah konsistensi kebijakan yang mengatur operasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Eksistensi penyuluh pertanian sebagai sebuah profesi dan jabatan fungsional yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian, dikukuhkan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K). Sejak diimplementasikannya Undang Undang tersebut, para penyuluh pertanian menganggap seperti punya rumah sendiri, karena Undang Undang tersebut mengamanatkan adanya kelembagaan penyuluh mulai dari

tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. Tidak hanya itu, dalam implementasinya menghendaki kearifan lokal sebagai wujud revitalisasi penyuluhan pertanian.

Namun hingga saat ini implementasi dan perubahan kebijakan yang mengatur operasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum sepenuhnya sejalan dengan dengan UU SP3K tersebut. Hal ini yang menyebabkan kinerja penyuluh pertanian belum berjalan optimal. Faktor penyebabnya adalah masih ditemukan permasalahan dalam hal : a) legislasi, b) materi atau program penyuluhan pertanian, c) kompetensi dan jumlah SDM penyuluh, organisasi dan manajemen serta infrastruktur penyuluhan. Sehingga kegiatan penyuluhan pertanian saat ini belum dapat secara optimal mendukung terwujudnya swasembada pangan. Pada hal target Kementerian Pertanian di tahun 2017 dapat tercapai swasembada padi, jagung dan kedelai.

Berdasarkan dinamika penyuluhan pertanian dilihat dari perspektif kebijakan dan kelembagaan

penyuluhan pertanian, referensi hasil kajian Mardiharini dan Jamal dapat digambarkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian berevolusi sebagai berikut :

- 1) Periode 1969-1985. Pada periode ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) disetiap kecamatan untuk mengakselerasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. BPP mengkoordinir PPL dengan pendekatan Latihan dan Kunjungan (LAKU). Seorang PPL mengelola satu WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian) yang meliputi satu sampai dua desa. Hasilnya terjadi perubahan nyata perilaku petani dari awalnya tidak menerapkan teknologi seperti pupuk dan obat-obatan menjadi terbiasa menerapkan. Pada periode ini sistem penyuluhan pertanian dinilai paling sukses karena memiliki kelebihan yakni : a) pendekatan polivalen (multi komoditi), b) jumlah penyuluh memenuhi kebutuhan dan masih berusia muda, c) mobilitas relatif tinggi, d) fasilitas memadai, e) lingkungan kerja kondusif. Masa ini disebut fase akseleratif dan keemasan Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada 1966. Pada 1969 Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras, sementara pada 1984 bisa mencapai 25,8 juta ton beras yang membawa Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984.
- 2) Periode 1986-1991. Pada periode ini, kebijakan penyuluhan pertanian ikut berubah seiring dengan terpecahnya Dinas Pertanian menjadi : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Hortikultura, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan. Kebijakan pembangunan pertanian terfokus pada program-program yang

- dilaksanakan. Para penyuluh didistribusikan ke dinas-dinas tersebut sesuai keahlian dan latar belakang pendidikan masing-masing. Saat itu BPP kurang berfungsi dan tugas penyuluh berubah dari polivalen menjadi monovalen. Terjadi reorganisasi penyuluhan pertanian yakni : a) WKPP bertambah dari 1-2 desa menjadi 1 kecamatan, b) kelompok binaan PPL berkurang, dan c) intensitas LAKU berkurang.
- 3) Periode 1991-1996. Pada periode ini terjadi penyerahan urusan penyuluhan pertanian melalui SKB Mendagri dan Menteri Pertanian Nomor 539/1991 dan 65/1991 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di daerah. Fungsi BPP dan sistem kerja penyuluhan pertanian berubah menjadi : a) penyuluh yang membidangi komoditas diserahkan ke dinas subsektor terkait, b) penyuluhan bersifat monovalen, c) administrasi kepegawaian penyuluh diserahkan kepada dinas subsektor, dan d) tidak ada rincian jenis pembinaan teknis yang jelas. Akibatnya terjadi kemunduran penyuluhan pertanian, BPP tidak berfungsi sesuai kondisi semula, bahkan sebagian pengamat menganggap kebijakan ini merusak tatanan penyuluhan yang telah mapan. Untuk mengantisipasi hal ini, tahun 1995, didirikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP). Penyuluh pertanian dan peneliti bekerjasama di bawah satu atap untuk menghasilkan rekomendasi inovasi teknologi spesifik lokasi.
- 4) Periode 1996-2006. Pada periode ini, diterbitkan SKB Mendagri dan Menteri Pertanian Nomor 54/1996 dan 301/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Pada kondisi ini

subsektor diintegrasikan, penyuluh merasakan angin segar karena leluasa berkibrah dan ada harapan untuk Berjaya kembali. Kehadiran BIPP hampir di seluruh kabupaten sebagai wadah mengintegrasikan penyuluh dari berbagai komoditas menempatkan penyuluh pada jati dirinya kembali. Sistem penyuluhan pertanian dikembalikan dari monovalen ke polivalen.

- 5) Periode 2006 hingga sekarang. Pada Periode ini ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. UU ini mengamanatkan dibentuknya kelembagaan penyuluh pertanian ditingkat Provinsi (Bakorluh Pertanian) dan ditingkat Kabupaten (Bapeluh Pertanian). Hal ini membawa angin segar bagi kiprah penyuluh dilapangan karena memberikan arahan yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab penyuluh pertanian. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang selama ini menjadi payung hukum bagi para penyuluh pertanian, karena yang berubah hanya struktur kelembagaannya saja, bukan sistem penyuluhannya. Jadi para penyuluh tidak perlu berfikir dan berasumsi macam-macam, yang perlu menjadi prioritas kedepan adalah bagaimana para penyuluh pertanian, dengan peran mereka bisa mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan petani, karena itulah tuga utama penyuluh pertanian. Namun dengan diterbitkannya Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomen Klatur, tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten dan provinsi ditiadakan dan dikembalikan ke dinas urusan pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Namun





bukan berarti penyuluh pertanian akan kehilangan rumah dan urusan kepegawaian mereka akan sulit, hanya saja penyederhanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyebabkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas mereka akan beralih dari Badan Penyuluhan ke Dinas Pertanian. Dengan kondisi ini banyak para pengamat mengawatirkan akan terjadi pengurangan ruang gerak penyuluh pertanian.

Berdasarkan dinamika kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap periode yang telah dijelaskan, telah terjadi perubahan kebijakan yang dianggap dapat mengganggu kinerja penyuluh pertanian. Artinya tidak semua kebijakan pada setiap periode mendukung kinerja penyuluh ke arah yang lebih baik. Pada hal konsistensi kebijakan dan lembaga pendukungnya sangat diperlukan untuk suatu keberhasilan penyuluhan pertanian di daerah. Apalagi saat ini Kementerian Pertanian sedang gencar melakukan Program UPSUS yang tujuannya

untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Sehingga ke depan ada 3 hal pokok yang perlu dikedepankan dalam pemberdayaan penyuluh pertanian yaitu : a) konsisten dalam penerapan program penyuluhan pertanian dengan menyesuaikan kondisi yang berkembang, b) kelembagaan penyuluhan pertanian dapat mempermudah sistem penyuluhan dan administrasi kepegawaian penyuluh pertanian, dan c) regulasi yang diterbitkan dapat menguntungkan penyuluh maupun lembaga yang memayunginya untuk suatu keberhasilan.

### SINERGITAS PENYULUH DENGAN PETANI DALAM PERSPEKTIF PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Kiprah penyuluh telah teruji, terbukti kehadiran fase akselerasi dan keemasan dengan tercapai swasembada beras tahun 1984. Secara kontinyu kegiatan penyuluhan pertanian terus di kembangkan dan mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif. Hal ini mutlak dilaksanakan karena dengan dekatnya hubungan antara petani dengan penyuluh akan terjalin hubungan emosional saling membutuhkan. Sinergitas antara penyuluh dan petani dapat dilihat dari 3 (tiga) hal saling membutuhkan dalam hal pengembangan kegiatan teknis di lapangan diantaranya : a) penyuluh pertanian harus mampu memberikan

ide-ide baru memberikan pengetahuan, kemampuan dan jalan keluar bagi para petani yang mengalami kesulitan dalam permodalan, akses pasar, dan alih teknologi sekaligus sebagai penghubung dengan lembaga keuangan, b) secara finansial tidak tertutup kemungkinan penyuluh memperoleh jasa dari petani, 3) intervensi teknologi terhadap penyuluh pertanian akan berdampak positif terhadap petani.



Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dilakukan pembinaan. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan dengan melibatkan kelembagaan penyuluhan dan penyuluh. Pada posisi ini jelas terlihat bahwa dalam penyelenggaraan



penyuluhan pertanian, kelembagaan penyuluhan, petani dan penyuluh saling membutuhkan dan bersinergi satu sama lain baik dalam meningkatkan produksi, produktivitas maupun dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian. Hal ini dapat dibuktikan manalaka terjadi persoalan penurunan produksi komoditas pertanian, tentu tidak lepas dari perhatian PPL. Jika tidak demikian, para petani akan kesulitan menghadapi dinamika perubahan yang terjadi pada sektor pertanian saat ini. Demikian halnya dalam peningkatan daya saing produk pertanian, penanganan pasca panen melalui intervensi teknologi sangat memungkinkan pelibatan penyuluh pertanian di dalamnya diantaranya dalam hal : a) pendamping petani

dengan petani, sumberdaya manusia penyuluh yang berkualitas dan handal sangat berperan dengan ciri : mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Strategi pemberdayaan penyuluh pertanian dalam meningkatkan daya saing komoditas pertanian adalah memberikan pelatihan kepada penyuluh pertanian melalui peningkatan program-program terkait kelembagaan, kuantitas dan kualitas



Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

dalam pemanfaatan alsintan (intervensi teknologi), b) pengolahan produk (diversifikasi pangan), c) distribusi hasil (pemasaran produk), dan d) menjembatani stabilitas harga dengan mitra usaha maupun investor.

Terkait peningkatan daya saing komoditas pertanian, Kementerian Pertanian cenderung tidak hanya fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, namun ada hal yang lebih penting yakni hilirisasi ( pengolahan, pemasaran, dan harga). Hal ini menjadi penting untuk lebih mendekatkan hubungan antara petani dengan penyuluh dalam konteks peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Disisi lain akan mempermudah menerapkan strategi pemberdayaan penyuluh pertanian. Untuk mewujudkan harapan terbinanya hubungan baik antara penyuluh

penyuluh serta perbaikan kelembagaan kelompok tani. Disamping itu, dukungan legislasi bidang pertanian yang mencakup keseluruhan aspek, sehingga terwujud peningkatan



produktivitas, perluasan pengamanan produksi, dan pemberdayaan kelembagaan pertanian serta dukungan pembiayaan usaha tani. Menyikapi hal ini, pengembangan pembangunan pertanian di masa mendatang perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap penyuluhan pertanian, karena penyuluhan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatnya kesejahteraan petani dan keluarganya adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian.

Ke depan, perlu dimaknai bahwa proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga penyuluh yang profesional, kelembagaan penyuluh yang handal, materi penyuluhan yang terus-menerus mengalir dan sesuai kebutuhan lapangan, sistem penyelenggaraan penyuluhan yang benar serta metode penyuluhan yang tepat dan manajemen penyuluhan yang polivalen.



## EFEKTIFITAS KINERJA PENYULUH PERTANIAN DALAM MENINGKAT PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN



Akhir-akhir ini, kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dinilai kurang maksimal. Peran PPL di berbagai daerah khususnya di kecamatan tidak terlalu menonjol karena masih banyak para petani yang kewalahan menghadapi permasalahan pada sektor pertanian baik produksi, provitas maupun peningkatan daya saing produk pertanian. Disisi lain, penyuluh pertanian belum terbiasa memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan Badan Litbang Pertanian. Pada hal pemanfaatan hasil penelitian dapat menjadi referensi menyelesaikan permasalahan dan kendala sejak dari hulu, on-farm, hilir dan jasa penunjangnya.

Kondisi penyuluh pertanian dahulu dengan sekarang sangat jauh berbeda, baik dilihat dari sisi : program penyuluhan, kualitas penyuluh serta kedekatan penyuluh dengan

petani. Artinya kondisi sebelumnya lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Untuk memperkuat eksistensi penyuluh pertanian saat ini, perlu disusun indikator kinerja penyuluhan yang dapat dikategorikan baik. Indikator tersebut adalah : 1) program penyuluhan pertanian disusun sesuai dengan kebutuhan petani, 2) rencana kerja penyuluhan pertanian disusun di wilayah kerja masing-masing, 3) tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pengwilayahan komoditas unggulan, 4) informasi teknologi pertanian terdesiminasi secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani, 5) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, kelompok tani, kelompok usaha/asosiasi dan usaha formal (koperasi dan usaha formal lainnya), 6) terwujudnya kemitraan

usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan, dan 7) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah kerja (Sumual, et.al, 2012).

Untuk mengefektifkan kinerja penyuluh pertanian, masing-masing indikator kinerja tersebut dijalankan oleh penyuluh pertanian dengan baik dengan mempertimbangkan : 1) faktor individu (pengalaman penyuluh), 2) faktor psikologi (persepsi penyuluh pertanian terhadap profesi penyuluh pertanian, sikap dan motivasi penyuluh pertanian), 3) faktor organisasi (imbalan penyuluh pertanian) dan faktor lingkungan kerja (jumlah petani binaan dan interaksi penyuluh dengan petani binaan) sedangkan yang berpengaruh negatif signifikan yaitu luas wilayah penyuluh pertanian. Disisi lain kinerja penyuluh belum dikatakan maksimal karena : a) kekurangan tenaga penyuluh



berakibat penyuluh harus bekerja ekstra bahkan terkesan dipaksakan untuk mendampingi petani di lapangan, b) bagi penyuluh pertanian yang berstatus THL(Tenaga Harian Lepas), ada yang beranggapan bahwa profesi penyuluh sebagai batu loncatan untuk menjadi pegawai negeri sipil sehingga dapat melemahkan kinerjanya sendiri, c) penyuluh profesional yang telah ditempa dengan berbagai keilmuan sebelumnya sudah berusia lanjut bahkan telah terkontaminasi dengan politik. Hal ini sangat kurang elok mengingat awalnya penyuluh telah berjanji untuk membantu petani dalam menjalankan usahatani. Tidak hanya itu, salah satu titik lemah dalam pemanfaatan pupuk dan benih

sebagai alat pemerintah dalam membantu pemerintah menciptakan swasembadapanganpendekatan peningkatan produksi usahatani oleh petani. Penyuluhan pertanian saat itu sangat diperhatikan dan dinilai sukses mengantarkan swasembada pangan. Selanjutnya pada masa orde reformasi, penyuluhan pertanian mengalami perubahan kelembagaan penyuluhan itu sendiri dengan keluarnya Undang-Undang otonomi daerah yang secara langsung berdampak pada kinerja penyuluh pertanian. Tidak hanya itu, terbitnya Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomen Klatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian

penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, artinya spesifik lokasi dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, b) menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing, c) tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas unggulan, dan d) terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani. Disamping itu, kinerja penyuluh pertanian juga dapat ditingkatkan melalui perwujudan kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan, dan inilah yang sedang digagas Kementerian Pertanian yakni pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.

Melalui amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 yang dijabarkan dalam Permentan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian, bahwa program penyuluhan pertanian telah diatur sedemikian rupa menurut mekanisme program penyuluhan pertanian terdiri atas : a) program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, b) program penyuluhan kecamatan, c) program penyuluhan kabupaten/kota, d) program penyuluhan provinsi, dan e) program penyuluhan nasional. Program ini disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun substansinya meliputi aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana sarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian. Program ini disusun sesuai kebutuhan spesifik lokasi dan memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tentu saja keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh komitmen



Kondisi penyuluhan pertanian yang terus mengalami perubahan baik sejak pemerintahan orde lama, orde baru sampai orde reformasi turut mempengaruhi citra penyuluhan pertanian. Pada masa orde baru penyuluhan pertanian dicitrakan sebagai alat pemerintah dalam membantu pemerintah menciptakan swasembada pangan dengan pendekatan peningkatan produksi usahatani oleh petani.

bersubsidi ada di penyuluh pertanian, utamanya dalam penyusunan RDKK dan penerapan pupuk berimbang. Kebanyakan penyuluh di lapangan tidak dapat mendampingi secara penuh akibat kesibukan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tidak seperti periode 1969-1985 yang merupakan periode kejayaan penyuluh dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian seperti padi.

Kondisi penyuluhan pertanian yang terus mengalami perubahan baik sejak pemerintahan orde lama, orde baru sampai orde reformasi turut mempengaruhi citra penyuluhan pertanian. Pada masa orde baru penyuluhan pertanian dicitrakan

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyebabkan ruang gerak penyuluh pertanian di daerah menjadi lebih sempit. Kondisi sekarang lembaga penyuluhan yang semula ada di provinsi berupa Bakorluh, sementara di kabupaten (Bapeluh), dapat dikatakan sudah tidak ada, sementara urusan penyuluhan pertanian diserahkan kepada dinas urusan pertanian daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Melihat kondisi seperti ini terus berlanjut, Kementerian Pertanian terus berpacu dengan waktu agar penyuluh pertanian di daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seperti sediakala. Ke depan, untuk menghasilkan kinerja penyuluh pertanian yang baik dapat mengacu pada : a) menyusun program





seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam memberikan layanan prima kepada petani. Selain itu diperlukan pula supervisi dan pemantauan yang ketat dalam mengawal setiap tahap kegiatan, guna memastikan tidak adanya kendala yang dihadapi oleh petani dalam menerapkan teknologi yang direkomendasikan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai konsistensi Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing komoditas pertanian, peranan sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci termasuk SDM penyuluh pertanian maupun petani sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Menciptakan penyuluh dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi berarti juga memperkuat perannya dalam melayani dan melakukan pembinaan terhadap petani sekaligus merupakan pelaku dan pelaksana yang dapat mensukseskan program pembangunan pertanian. Berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan terkait “ Peran penyuluh pertanian ditinjau dari perspektif peningkatan daya saing produk pertanian dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### Kesimpulan

1) Selama 5 (lima) periode implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Indonesia, operasionalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum sepenuhnya konsisten dan sinkron dengan regulasi yang memayunginya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja

penyuluh serta target produksi yang ingin di capai. Faktor yang menjadi penyebab utama adalah berkaitan dengan legislasi, materi atau program, kompetensi dan jumlah SDM penyuluh, organisasi/ kelembagaan penyuluh dan manajemen serta infrastruktur penyuluhan.

- 2) Terkait kelembagaan penyuluhan pertanian dinilai penting dalam mendukung percepatan pembangunan pertanian karena dengan kejelasan bentuk institusi dilihat dari sisi manajemen, maka pembinaan dan pengawasan kepada penyuluh dapat dilakukan secara optimal. Sehingga pendampingan oleh penyuluh dapat dilaksanakan dengan baik dan akan berdampak terhadap peningkatan kemampuan petani dalam mengelola usahatani.
- 3) Untuk mengefektifkan kinerja penyuluh pertanian, perlu konsistensi dan sinkronisasi legislasi bidang pertanian yang mencakup keseluruhan aspek pendukungnya sehingga akan terwujud peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, pemberdayaan kelembagaan pertanian serta dukungan pembiayaan usahatani.
- 4) Selama ini penguatan sektor pertanian terlalu fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas (hulu dan on-farm) dengan target pencapaian swasembada. Sehingga keterlibatan penyuluh juga fokus pada subsektor hulu dan on-farm. Pada hal subsektor hilir seperti pengolahan, diversifikasi, pemasaran dan harga merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk pertanian. Untuk itu secara nasional intensitas pendampingan/ pengawalan penyuluh terhadap

petani perlu ditingkatkan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas petani, peningkatan daya saing komoditas pertanian bukan semata-mata pada peningkatan produksi.

- 5) Kurangnya sosialisasi terhadap legislasi penyuluhan dan produk turunannya menyebabkan persepsi pemerintah daerah tentang penyuluhan pertanian yang beragam antar daerah, sehingga terdapat perbedaan dalam penetapan skala prioritas, termasuk ketidaktepatan dalam alokasi anggaran dan SDM penyuluh.

### Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil kajian ini adalah :

- 1) Untuk mengoptimalkan kinerja penyuluh pertanian, disarankan agar program penyuluhan pertanian lebih mencerminkan kegiatan penyuluh spesifik lokasi dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian, sehingga melalui diversifikasi produk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- 2) Agar ada produk turunan UU Nomor 16/2006, misalnya dalam bentuk Permentan khususnya terkait kebijakan operasional penyuluhan pertanian tentang hak-hak petani untuk dapat mengakses sumberdaya alam, informasi, teknologi, ekonomi, manajemen, hukum dan pelestarian lingkungan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mendekatkan hubungan antara penyuluh dan petani.
- 3) Agar ada kajian lanjutan yang lebih spesifik terkait Penguatan peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan daya saing komoditas pertanian ditinjau dari perspektif inovasi dan intervensi teknologi.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Musa F. Banunaek, Suminah, dan Ravik Karsidi. 2017. Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, September 2017 Vol. 13 No.2.
2. Maesti Mardiharini dan Erizal Jamal. Reformasi kebijakan Penyuluhan Pertanian Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian Jangka Panjang.
3. Nova S. Sumual , Olvie. L. S. Benu , Gene Kapantow , Melisa L. G. Tarore. Kajian Kinerja Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Amurang Timur
4. Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Permentan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.
6. Sapar , Amri jahi , Pang S. Asngari , Amiruddin , dan I.G. Putu Purnaba. 2012. Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan The Performance Agricultural Extension Workers and their Impact at Competence Cacao Farmers in four District South Sulawesi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muahammadiyah, Palopo, Sulsel Institut Pertanian Bogor.
7. Sekat Inten, Dewi Elviana, dan Budi Rosen Nover. 2017. Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Komoditas Padi Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Fakultas Pertanian Universitas Borneo, Tarakan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan



# PERANAN PENYULUH PERTANIAN DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM UPSUS PAJALE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

Dedi Mulyadi  
(Perencana Madya, Badan PPSDMP)



## ABSTRAK

Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Mensukseskan Program Upsus Pajale Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Tujuan tulisan ini adalah (a) mengetahui kedudukan penyuluh pertanian dalam pemerintah daerah. (b) mengetahui Program UPSUS pajale dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian di daerah. (c) mengetahui peran penyuluh dalam mensukseskan Program UPSUS Pajale. Hasil dari tulisan ini adalah (1) kedudukan penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian seringkali berubah sesuai dengan perubahan dinamika pembangunan pertanian dan semangat otonomi daerah, (2) program UPSUS merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada Pangan. Swasembada pangan berkelanjutan dapat dicapai manakala petani selaku pelaku utama atau produsen pangan terbangun motivasi dan semangatnya untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkannya. Kemauan dan kemampuan petani dan

keluarganya dalam berusahatani, (3) Penyuluhan merupakan aktor penting penentu keberhasilan pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penyuluh Pertanian berperan sebagai fasilitator, pendidik, dan teknikal, melalui kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada petani.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi masih akan tetap berbasis pada sektor pertanian. Sektor Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Dimana Sektor pertanian masih menyumbang PDB yang cukup besar yaitu 9,22% dengan pertumbuhan 3,19%, periode 2010-2014 (Restra Badan PPSDMP, 2015). Namun demikian sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, dengan kata lain kegiatan pertanian mulai dari hulu sampai hilir menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional.

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi, yaitu (1) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. (2) terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk (3) kelemahan dalam sistem alih teknologi (4) muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Yang terakhir menyangkut (5) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga

yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan (Nurdin Yusuf, 2013).

Pemerintah melalui kabinat Kerja menetapkan program utama yang berfokus pada kemandirian pangan dan energi untuk menjamin ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Salah satu bentuk nyata realisasi program tersebut adalah swasembada pangan. Untuk mencapai realisasi tersebut pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target produksi padi sebesar 73,40 juta ton, jagung sebesar 20,33 juta ton dan kedelai 1,27 juta ton. Kementerian pertanian telah mengambil kebijakan upaya khusus (UPSUS) Percepatan penapaian swasembada padi, jagung dan kedelai. Pada tahun 2016 target diperluas terhadap pencapaian 7 komoditas strategis nasional yaitu padi sebesar 76,23 Juta ton, jagung sebesar 1,35 Juta



Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya.

ton, kedelai sebesar 2,03 Juta ton, gula sebesar 3,27 juta ton, bawang merah sebesar 1,173 ribu ton, cabai 1.108 ribu ton dan daging sapi/dan kerbau 0,59 juta ton.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk itu kegiatan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif.

Pengembangan pembangunan pertanian di masa mendatang perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap penyuluhan pertanian, karena penyuluhan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatnya kesejahteraan petani dan keluarganya adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian.

Mosher (1981) mengemukakan bahwa untuk mempercepat pembangunan pertanian setiap petugas perlu terus diberi kesempatan untuk belajar mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dan meningkatkan

keahlian khususnya selama ia masih aktif dalam jabatannya. Karena salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM pertanian adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Sumberdaya pertanian yang dimaksud di atas, selain petani juga aparaturnya yang didalamnya termasuk penyuluh pertanian.

Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Mugniesyah (2006) mengemukakan bahwa teknologi yang senantiasa berubah ini sebagai bagian dari konsep yang disebut inovasi. Peranan penyuluhan dikatakan berhasil jika individu-individu petani mau



menerima dan menerapkan alternatif inovasi pertanian yang paling tepat bagi usaha tani mereka. Oleh karena itu penyuluh pertanian berupaya agar petani belajar untuk sampai pada mau mengambil keputusan untuk mau menerima dan menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas usahatani mereka. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui seberapa besar peranan penyuluhan untuk pembangunan pertanian, terutama dalam mendukung Program UPSUS Pajale sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Penyuluh Pertanian dalam Pemerintah Daerah

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu

kelompok social (Sukanto, 1990 dalam anonymous, 2010). Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise-nya dan hak-hak kewajibannya. Menurut Soekanto (1990) dalam Anonymous, 2010 kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise-nya dan hak-hak kewajibannya.

Kaitannya dengan kedudukan penyuluh pertanian, Timmer dalam Mardikanto, 2010 menyebutkan bahwa penyuluh pertanian sebagai perantara atau jembatan penghubung antara teori dan praktek, pengalaman dan kebutuhan, pengusaha dan masyarakat, produsen

dan pelanggan, sumber informasi dan penggunaannya dan antara masyarakat di dalam dan di luar, kaitannya dengan agribisnis.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Lionberger dalam Mardikanto (2010) dalam meletakkan penyuluhan sebagai “variabel antara” (intervening variable), dalam pembangunan (pertanian) yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan masyarakatnya.

Dalam pembangunan pertanian, kedudukan penyuluhan sebagai “perantara” perannya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian. Terkait, “kedudukan penyuluh (pertanian)”, maka kedudukan tidak berada di atas atau lebih tinggi dibanding petaninya, melainkan dalam “posisi yang sejajar”. Kedudukan sebagai mitra-sejajar tersebut, tidak hanya

terletak pada proses sharing selama berlangsungnya kegiatan penyuluhan, tetapi harus dimulai dari: sikap pribadi dalam berkomunikasi, tempat duduk, bahasa yang digunakan, sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling mempedulikan karena merasa saling membutuhkan dan memiliki kepentingan bersama.

Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan/ atau Penyuluh Pertanian Swasta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/11/2008, kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri-sendiri maupun

petani menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan ke depan; (2). Membantu petani menyadari terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut; (3). Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani; (4). Membantu petani memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya sehingga mereka mempunyai berbagai alternatif tindakan; (5). Membantu petani memutuskan pilihan tepat yang menurut pendapat mereka sudah optimal; (6). Meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya ; dan (7). Membantu petani untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan” (Van Den Ban, et.al ,2003).



penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

kerjasama yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian, sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

“Penyuluhan secara sistematis adalah suatu proses yang (1). Membantu

Pemerintah daerah di Era desentralisasi mendapat ruangan yang luas untuk mengelola wilayah secara otonomi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menjelaskan pengertian otonomi daerah sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian desentralisasi dapat dimaknai

juga sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber kekayaan alam di wilayah administrasi untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah menyebutkan adanya urusan pemerintah konkuren, yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota, yaitu terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pertanian termasuk urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pengelolaan urusan pertanian berkenaan dengan peningkatan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditas pertanian akan tetapi sekaligus mengelola urusan pangan dan mengelola urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan pertanian terdapat unsur penting kedudukan penyuluh pertanian yang merupakan faktor penentu keberhasilan, mengingat bahwa kegiatan penyuluhan merupakan unsur pendidikan bagi petani dan keluarganya.

Dalam Undang-undang NO 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.



Oleh karena itu, keberadaan fungsi penyuluhan pertanian sangat penting bagi Pemerintahan Daerah dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas, maka setiap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seyogyanya mempertimbangkan dengan cermat penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan dikoordinasikan dengan Menteri Pertanian.

Kegiatan penyuluhan pertanian pada dasarnya berpedoman pada azas “menolong petani agar ia mampu menolong dirinya sendiri”. Penyuluhan pertanian bertujuan untuk membantu petani dan keluarganya agar secara bertahap berkembang kemampuan intelektualnya dan semakin bertambah informasi yang diperlukan

untuk memajukan usaha tani yang dikelolanya. Melalui penyuluhan pertanian, petani dan keluarganya akan memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam berusahatani dan dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi diri dan keluarganya.

Untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian, pemerintahan daerah memerlukan keberadaan tenaga penyuluh pertanian. Pemerintahan Daerah akan berhasil melaksanakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan apabila didukung oleh keberadaan tenaga penyuluh pertanian yang mampu menggerakkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya dalam mengelola usahatani sehingga mampu mencapai kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan cermin keberhasilan Pemerintahan Daerah.

**B. Program UPSUS Pajale dalam Kaitannya dengan Pembangunan Pertanian di Daerah.**

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai dan komoditas pangan strategis nasional yang dipopulerkan dengan sebutan Program UPSUS PAJALE, merupakan salah satu strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian dalam mewujudkan agenda prioritas di bidang pertanian, khususnya peningkatan kedaulatan pangan. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat



Tabel 1. Capaian Produksi Padi, Jagung dan kedelai skala Nasional pada Tahun 2015 dan 2016 dan Perkiraan Capaian 2019

Komoditas	Satuan	2014	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019
		(baseline)	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Padi	Juta ton	70,60	73,40	76,23	75,40	79,14	82,00	Sudah Tercapai
Jagung	Juta ton	19,10	20,00	21,35	19,60	23,16	24,10	Sudah Tercapai
Kedelai	Juta ton	0,92	0,90	1,82	0,96	0,88	2,60	Sangat Sulit Tercapai

Sumber : Bappenas, 2017. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015 - 2017

serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Lebih lanjut, disebutkan bahwa tercapainya kedaulatan pangan tercermin pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri dengan adanya (a) dukungan ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (b) kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; (c) kemampuan melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

pada terwujudnya swasembada untuk menjaga kemandirian dalam penyediaan pangan pokok nasional. Peningkatan produksi kedelai utamanya ditujukan untuk mengamankan pasokan bagi pengrajin dan kebutuhan konsumsi beragam produk olahan kedelai (tahu dan tempe). Peningkatan produksi jagung ditargetkan pada memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Peningkatan produksi daging sapi ditujukan untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga. Adapun

lapangan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/OT.10/3/2015 tentang Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Program UPSUS pada dasarnya menstimulir percepatan gerak pembangunan pertanian di Daerah. Program UPSUS dilaksanakan secara intensif dengan menerapkan 7 (tujuh) strategi utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP). Strategi yang ditempuh yaitu meliputi (i) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (ii) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (iii) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (iv) pendekatan penguatan dari sisi ketersediaan benih; (v) penguatan kelembagaan petani; (vi) pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; dan (vii) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi. Termasuk salah satu strategi pendukung dalam penyelenggaraan Program UPSUS adalah penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Dengan P3KP tidak ada alasan hambatan keterbatasan sarana produksi bagi pencapaian target Program UPSUS karena seluruh kebutuhan input produksi disediakan dalam jumlah yang memadai.

Proses adopsi terhadap berbagai inovasi teknologi yang direkomendasikan untuk percepatan peningkatan produksi didorong agar berlangsung

“ Untuk menjamin tercapainya target produksi, dalam program UPSUS juga dikembangkan sistem pengawalan dan pendampingan terpadu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Di tingkat lapangan, penyuluh pertanian melakukan pendampingan dan pengawalan petani bersama mahasiswa dan bintang pembina desa (babinsa).

Program UPSUS merupakan salah satu strategi utama yang dikembangkan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan. Program UPSUS bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai, dan bawang merah. Melalui Program UPSUS diharapkan dapat terwujud swasembada berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Peningkatan produksi padi diarahkan

peningkatan produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.

Untuk menjamin tercapainya target produksi, dalam program UPSUS juga dikembangkan sistem pengawalan dan pendampingan terpadu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Di tingkat lapangan, penyuluh pertanian melakukan pendampingan dan pengawalan petani bersama mahasiswa dan bintang pembina desa (babinsa). Mekanisme kerja pengawalan dan pendampingan di



dalam waktu singkat. Petani diajak untuk segera mengikuti irama gerak cepat yang dibangun dalam Program UPSUS dengan target pencapaian swasembada dalam 3 (tiga) tahun.

Dengan adanya dukungan UPSUS tersebut, menunjukkan kinerja Pertanian yang cukup positif terhadap dua komoditas sasaran UPSUS di bidang pangan yaitu komoditas padi dan jagung, sedangkan untuk komoditas kedelai pada tahun 2015 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan karena adanya peningkatan produksi sedangkan pada tahun 2016 produksi kedelai mengalami penurunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan data tersebut, memperlihatkan capaian produksi padi di tahun 2015 yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan luas panen sampai 319 ribu ha dan meningkatnya produktivitas sebesar 2,06 kuintal/hektar (ku/ha); kemudian tahun 2016 peningkatan produksi padi dipengaruhi

oleh peningkatan luas panen yang cukup tinggi, seluas 919 ribu ha, sebagai hasil dari kegiatan upaya khusus (UPSUS).

Jumlah produksi jagung pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan. Namun apabila dibandingkan dengan target tahunan di RPJMN 2015-2019 selama 2014- 2016 cenderung menurun. Peningkatan produksi jagung tahun 2016 terjadi oleh karena peningkatan luas panen sebesar 597 ribu ha dan produktivitas sebesar 1,05 ku/ha.

Capaian produksi kedelai, selama 2015-2016 menunjukkan penurunan. Akan tetapi pada tahun 2015 dapat melampaui target dimana target 0,92 juta ton dan realisasinya 1,82 juta ton, sedangkan pada target tahun 2016 sebanyak 0,96 juta ton dan realisasinya 0,88 juta ton menurun. Rendahnya produksi kedelai tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya minat petani untuk menanam kedelai karena tidak adanya insentif harga.

### C. Peran penyuluh dalam mensukseskan Program UPSUS Pajale

Sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, tenaga penyuluh pertanian berperan sentral dalam menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan pertanian. Membangun kesadaran petani dan keluarganya untuk mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam melakukan akses informasi, pasar, teknologi, pemodal, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan produktivitas merupakan tugas seorang penyuluh. Dalam Program UPSUS penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di ilayah kerjanya yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh babinsa terutama dalam pelaksanaan gerakan serentak, pengawalan dan pengamanan. Sedangkan dalam hal penerapan teknologi dan inovasi



peningkatan produksi, penyuluh dibantu oleh mahasiswa.

Dalam Program UPSUS, sebagai tim pengawalan dan pendampingan, penyuluh bersama babinsa dan mahasiswa dituntut kemampuannya untuk memiliki keterampilan dalam memberikan bimbingan kepada petani dalam hal penerapan teknologi yang direkomendasikan. Namun, sesuai dengan tugas pokoknya, sebagai “agen peubah” yang bertindak selaku motivator, dinamistor, komunikator, advisor, organistor, edukator, dan sekaligus fasilitator pembangunan, seorang penyuluh harus dapat mengoptimalkan diri dalam menjalankan perannya sehingga partisipasi petani dan keluarganya dalam Program UPSUS dapat terbangun sebagai kekuatan yang mendasar bagi terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.



Penyuluh pertanian harus mampu menjadikan momentum gerakan Program UPSUS sebagai titik tolak membangun kesadaran petani untuk mampu berproduksi secara mandiri dan sekaligus mampu mencapai kesejahteraan keluarganya. Penyuluh harus mampu membangun sistem usaha tani yang komprehensif, yaitu yang berkembang dari sistem delivery teknologi dan informasi untuk kpeningkatan produksi menjadi sistem agribisnis yang menguntungkan bagi petani baik secara individu maupun secara bersama dalam suatu kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan).

Penyuluh pertanian harus mampu menjadikan momentum gerakan Program UPSUS sebagai titik tolak membangun kesadaran petani untuk mampu berproduksi secara mandiri dan sekaligus mampu mencapai kesejahteraan keluarganya. Penyuluh harus mampu membangun sistem usaha tani yang komprehensif,

yaitu yang berkembang dari sistem delivery teknologi dan informasi untuk kpeningkatan produksi menjadi sistem agribisnis yang menguntungkan bagi petani baik secara individu maupun secara bersama dalam suatu kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan). Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan capaian Program

Tabel 1. Tugas Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian, Mahasiswa dan Babinsa

PENYULUH	MAHASISWA/ ALUMNI	BABINSA
Melaksanakan pengawalan dan pendampingan Pelaksanaan GP-PTT, Percepat Optimasi Lahan (POL), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), Penambahan Areal Tanam (PAT), dan Denfarm	Bersama penyuluh melakukan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL, RJIT, PAT, dan Denfarm	Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan : (a) . Tanam Serentak, (b) Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi; Gerakan Pengendalian OPT dan panen
Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, P3A, dan GP3A) dan kelembagaan ekonomi petani.	Bersama penyuluh memfasilitasi intro-duksi teknologi peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui denfarm; dan Mengem-bangkan model pem-berdayaan petani.	Melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk: (a) penyaluran benih, pupuk dan alsintan; (b) infrastruktur jaringan irigasi.
Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha	Bersama penyuluh mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha.	Melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.
Melakukan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.	Bersama penyuluh melakukan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.	Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.



UPSUS, seorang penyuluh juga perlu memiliki orientasi kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir.

Menurut Mosher (1991) menguraikan tentang peran penyuluh pertanian dalam melakukan kegiatannya dapat berperan sebagai guru, penganalisa, penasihat, sebagai organisator, sebagai pengembang kebutuhan peuban, penggerak peubah dan pemantap hubungan masyarakat petani. Kartasapoetra (1994), juga menjelaskan tentang peran penyuluh yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan pertanian berbasis rakyat. Peran tersebut adalah (a) sebagai peneliti, mencari masukan terkait dengan ilmu dan teknologi, penyuluh menyampaikan, mendorong, mengarahkan, dan membimbing petani mengubah kegiatan usaha taninya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi. (b) Sebagai pendidik; meningkatkan pengetahuan untuk memberikan informasi kepada petani, penyuluh harus menimbulkan semangat dan kegairahan kerja para petani agar dapat mengelola usahatannya secara lebih efektif, efisien, dan ekonomis. (c) Sebagai penyuluh; menimbulkan sikap keterbukaan bukan paksaan, penyuluh berperan serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para petani beserta keluarganya.

Dapat dilihat pada peran penyuluh sangat berat, mengharuskannya memiliki kemampuan tinggi. Oleh karena itu, kualitas dari penyuluh harus terus ditingkatkan sehingga mampu berperan dalam memberikan penyuluhan dan mewujudkan pembangunan pertanian.

Mengingatkan kembali, mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.14 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Pajale bahwa pelaksanaan pengawasan dan pendampingan dilakukan secara terpadu antara penyuluh, Babinsa dan mahasiswa/alumni sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pendampingan dan pengawasan UPSUS Pajale merupakan faktor penting dalam pencapaian target produksi yaitu dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Setiap eselon 2 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendapat tugas untuk mengawal pelaksanaan Upsus Pajale di 4-5 kabupaten sentra produksi Pajale.

Meski pengawasan dan pendampingan ini dilakukan penyuluh pertanian,

Babinsa dan mahasiswa, tentu saja tugas berbeda-beda. Tugas penyuluh pertanian adalah melaksanakan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL, RIJT dan PAT. Penyuluh berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kelembagaan petani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani) dan kelembagaan ekonomi petani, mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha, dan melakukan identifikasi pendataan serta pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

Penyuluh sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh babinsa terutama dalam pelaksanaan gerakan tanam serempak serta pengawasan dan pengamanan bantuan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan upaya khusus Pajale dijadikan indikator kinerja kelembagaan penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian lapangan termasuk penyuluh kontrak.

Untuk mewujudkan swasembada pangan, peran penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting. Disamping itu juga berperan dalam penerapan teknologi, penggunaan varietas unggul, pemupukan berimbang, penanam jarak tanam jaar, konsisten kalender tanam, mekanisasi serta perluasan areal. Penyuluh memiliki peran yang strategis dalam UPSUS PAJALE untuk pencapaian swasembada pangan, juga dalam pengembangan kawasan tujuh komoditas strategis (Padi, jagung, kedelai gula, sapi, cabai dan bawang merah).

Penyuluh selama ini telah banyak mengajarkan pengetahuan, keterampilan, mendampingi, dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani dan kehadiran penyuluh di lapangan selalu mendapat respon yang positif.



Seorang penyuluh harus menerapkan indikator kinerja secara utuh terutama unsur-unsur; mendiseminasikan informasi teknologi (penggunaan metode penyuluhan pertanian yang tepat), memberdayakan dan memandirikan pelaku utama, menjalin kemitraan usaha dengan unsur-unsur terkait yang dapat mendukung suksesnya usahatani, mewujudkan akses pelaku utama ke lembaga keuangan, sumber-sumber informasi, sarana produksi dan pemasaran hasil, responsivitas, kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyuluh pertanian.

Faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja penyuluh misalnya adanya insentif dalam bentuk piagam penghargaan, kepercayaan petani terhadap penyuluh pertanian dan proses kenaikan pangkat (kepangkatan), namun demikian tidak dapat dipungkiri adanya beberapa faktor penghambat lainnya seperti pembinaan karier, tingkat kepercayaan penyuluh terhadap kebijakan organisasi, kejelasan tugas/wewenang, dan rasio penyuluh dengan jumlah desa/kelurahan binaan.

Sebenarnya, petanilah yang menjadi penentu akhir terwujudnya target peningkatan produksi pangan negeri ini. Keterlibatan semua pihak disini, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, TNI AD, dan akademisi tetap tidak bisa melupakan peran penting para petani. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh-sungguh dan berkomitmen mendampingi petani dengan informasi, teknologi, dan solusi-solusi kekinian terhadap persoalan yang dihadapi oleh petani, baik di on farm maupun off farm.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian seringkali berubah sesuai dengan perubahan dinamika pembangunan pertanian dan semangat otonomi daerah.
2. Program UPSUS merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada Pajale, dan swasembada berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Swasembada pangan berkelanjutan dapat dicapai manakala petani selaku pelaku utama atau produsen pangan terbangun motivasi dan semangatnya untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkannya.. Kemauan dan kemampuan petani dan keluarganya dalam berusahatani.
3. Penyuluhan merupakan aktor penting penentu keberhasilan pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penyuluh Pertanian berperan sebagai fasilitator, pendidik, dan teknikal, melalui kegiatan pengawasan dan pendampingan kepada petani.

#### B. Saran

1. Dalam upaya meningkatkan swasembada Pajale yang berkelanjutan Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan dukungan bagi penguatan kapasitas dan profesionalisme tenaga penyuluh pertanian, melalui kegiatan pelatihan, magang, studi banding.

2. Materi pembelajaran yang diberikan kepada para penyuluh pertanian berupa metodologi penyuluhan dan bidang teknik pertanian dari hulu sampai hilir dan manajemen usahatani.

### DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 2010. Catatan Kuliah2ku. <http://catatankuliah2ku.blogspot.co.id/2010/11/peranan-penyuluhan-dalam-pembangunan.html>.

-----, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah.

-----, 2006. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

-----, 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah.

-----, 2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2015 Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu, Penyuluhan, Mahasiswa, Bintara Pembina Desa dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Poduksi Padi, Jagung dan Kedelai.

Bappenas, 2017. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015 – 2019.

Mosher. AT. 1991. Menggerakkan dan Membangun Pertanian, V. Yasaguna, Jakarta.

Mardikanto, 2010. Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Penerbit TS, Surakarta

